

**ISU PATRIARKI PADA PEREMPUAN DALAM BIROKRASI LOKAL  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN ANTANG KOTA MAKASSAR)**



*Skripsi*

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**OLEH:  
NURFITRIYANI  
NIM. 10538291114**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
NOVEMBER, 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Nurfitriyani, NIM 10538 2911 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014 Tahun 1440 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari tanggal 1 Februari 2019.

24 Jumadil Awal 1440 H  
Makassar, -----  
30 Januari 2019 M

**PANITIA UJIAN**  
Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahmattulrahim, SE, MM.  
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.  
Penguji :  
1. Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
2. Andi Adam, S.Pd., M.Pd.  
3. Dr. Jaelan Osman, M.Si.  
4. Lubnan Ismail, S.Pd., M.Pd.



*Handwritten signatures and initials:*  
- *Erwin* (Ketua)  
- *Baharullah* (Sekretaris)  
- *Nurdin* (Penguji 1)  
- *Adam* (Penguji 2)  
- *Jaelan* (Penguji 3)  
- *Lubnan* (Penguji 4)

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
*Erwin Akib*  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi  
*Drs. H. Nurdin*  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Isu Patriarki pada perempuan dalam birokrasi lokal (studi kasus Kelurahan antang kota makassar)

Nama : Nurfitriyani

NIM : 10538 2911 14

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Jumadil Awal 1440 H

Makassar,

30 Januari 2019 M

Dibahkan oleh:

Pembimbing I

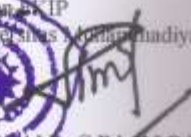
Pembimbing II

  
Dr. Eliza Meivani, M.Si

  
Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

  
Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM/ 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM/ 575 474

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Keep going as long as you are on the right path, even though sometimes  
goodness is not always appreciated”*

**(Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang  
kebaikan tidak selalu dihargai)**

**Kupersembahkan itu untuk kedua orang tuaku, saudara(i)ku, dan teman-  
teman.**

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang Isu Patriarki yang terjadi pada masyarakat terkait dengan kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan. Penulis menggunakan teori patriarki. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Isu patriarki pada perempuan dalam birokrasi di kelurahan antang kota Makassar, serta untuk mengetahui eksistensi perempuan yang ada di ruang public di kelurahan antang kota Makassar.

Hasil dari penelitian ini Keberadaan perempuan di ruang public sudah dapat diterima oleh masyarakat di kelurahan antang. Laki-laki dan perempuan boleh menjadi bagian dari birokrasi juga bias mengerjakan pekerjaan yang biasa diperankan oleh laki-laki, kecuali didalam agama dan keluarga. Karena dalam agama perempuan tidak boleh menjadi imam dalam keluarga kepala keluarga tetap laki-laki (Ayah), padahal kekatnya perempuan tidak ingin melebihi laki-laki. Mereka hanya ingin setara saja, dan ketikaitu bias sejalan perempuan bias terbebas dari berlenggu budaya patriarki.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap isu patriarki pada perempuan dalam birokrasi kelurahan antang mengenai isu patriarki pada perempuan dalam birokrasi dan keberadaan perempuan dalam birokrasi dikonstruksi oleh social budaya menempatkan perempuan dalam pemikiran masyarakat hanya di domestic saja. Keberadaan perempuan dirana public masih menjadi sorotan, karena keterikatan tradisional ini membuat perempuan masih dalam taraf ketidakmandirian secara politik

**Kata Kunci: Patriarki, Perempuan, Birokrasi**

## **KATA PENGANTAR**

assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Allah maha penyayang dan pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmatnya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugrah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-mu, sang khalik. Proposal ini adalah setitik dari sederetan berkah-mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua Haedar Anwar.,BA dan Marwani yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses menuntut ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudarasaya Nur Qolbi, Muh. Nur Taqwa, AswanulAmri, Alfian Asri serta teman-teman sayaRatih, Vivi, Ija, Hasna

yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan canda.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Dr. Rahman Rahim, M.Pd. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib, M.Pd, Ph.D, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Drs. H. Nurdin, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Kaharuddin.,M.Pd,Ph.d Selaku Sekretaris Program Pendidikan Sosiologi, selanjutnya kepada Dr. Eliza Meiyani, M.Si dan Syarifuddin, S.Pd.M.Pd, sebagai pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini. Serta kepada seluruh dosen dan karyawan dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Bapak Lurah Antang Amanda Syahwaldi.,S.Stp,M.Si yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Serta ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Ibu sekretaris dan Staf-staf KelurahanAntang, serta masyarakat Kelurahan Antang yang telah menyediakan waktunya untuk saya wawancara mengenai masalah yang saya angkatdalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, karena penulis

yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat member manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar, November 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halam Judul .....	ii
Halaman pengesahan.....	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Surat Pernyataan.....	v
Surat Perjanjian .....	vi
Moto dan Persembahan .....	vii
Abstrak .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar.....	xvi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Teori.....	14
1. Penelitian Terdahulu .....	14
2. Konsep Patriarki dan Perempuan .....	14

3.Konsep Ketidakadilan Gender .....	19
4.Patriarki dan Perempuan dalam Birokrasi .....	22
5.Perempuan dalam Realitas Birokrasi .....	31
6.Perempuan dalam Dinamika Birokrasi .....	33
7.Teori-teori .....	37
B. Kerangka Konsep .....	38

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Fokus Penelitian.....	46
E. Instrument Penelitian .....	46
F. Jenis dan Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. Teknik Analisis Data .....	49
I. Teknik Keabsahan Data .....	50

### **BAB IV: GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Kelurahan Antang .....	53
B. Gambaran Umum Kelurahan Antang .....	55
C. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Antang.....	57
D. Kependudukan .....	58
E. Keadaan Demografis.....	59
F. Keadaan Penduduk Menurut Agama .....	60

G. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	61
H. Budaya Kota Makassar .....	62
<b>BAB V: ISU PATRIARKI PADA PEREMPUAN DALAM BIROKRASI</b>	
A. Hasil Penelitian .....	64
B. Penjabaran Hasil Penelitian .....	71
C. Interpretasi Hasil Penelitian.....	73
<b>BAB VI: KEBERADAAN PEREMPUAN YANG ADA DI RUANG PUBLIK</b>	
A. Hasil Penelitian .....	77
B. Penjabaran Hasil Penelitian .....	81
C. Interpretasi Hasil Penelitian.....	84
D. Cara KerjaTeori .....	87
<b>BAB VII: PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel.3.1 Daftar Informan.....	45
Tabel.4.2 Letak Batas Kelurahan Antang .....	55
Tabel.4.3 Daftar RW Kelurahan Antang .....	55
Tabel,4.4 Daftar Kependudukan Kelurahan Antang.....	56
Tabel.4.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	57
Tabel.4.6 Jumlah Sarana Pendidikan .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar.3.1 Purposive Sampling.....	43
Gambar.4.2 Peta Lokasi Kelurahan Antang.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia menjadi tanah jajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Pada zaman penjajahan saat itu Belanda tidak hanya menjajah Indonesia lewat segi sumber daya saja, tapi juga masyarakatnya, terutama perempuan. Maka timbul budaya yang sangat menindas terhadap perempuan saat itu yaitu budaya patriarki. Budaya patriarki muncul ketika pada era penjajahan oleh kolonial Belanda. Patriarki disini dapat diartikan sebagai otoritas laki-laki yang berada diatas perempuan.

Dalam pemahaman agama manusia semakin memberikan jarak antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Sejarah kelam ketika struktur patriarki yang disebabkan oleh ajaran dogmatis yang Berjaya dimasa lalu mulai terulang kembali, hanya pemain saja yang berubah tapi muatan kekerasan dan kezaliman tetap mengisi ruang-ruang yang kosong dari intelektual dan spiritual yang sebenarnya dapat diperoleh dengan makrifatnya.

Dalam relasi sosial akan ditemukan banyak permasalahan yang diakibatkan oleh perbedaan yang tidak mampu dipahami dan dimanage oleh kebanyakan manusia. Berbicara mengenai filsafat terdapat perbedaan antara perempuan dan istri, perempuan terkait aspek umum sementara istri terkait aspek khusus.

Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi antara kesamaan hak dan keadilan dengan laki-laki. Feminisme ini mulai

berkembang ketika zaman renaissance atau zaman pencerahan. Pada saat itu berkembanglah pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas social, maka ketika itu semua kalangan perempuan baik kalangan atas, menengah, dan kebawah tidak memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan, berpolitik hak atas milik dan pekerjaan. Oleh karena itu, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki dihadapan hukum.

Dalam islam perempuan memiliki kemerdekaan sosial tersendiri baik itu dalam segi pernikahan hingga bersosialisasi dengan lingkungannya. Sebagian perempuan yang mengatasnamakan dirinya perempuan modern menganggap bahwa perempuan-perempuan yang mengikuti syariat islam bersifat kaku. Dan lebih parah lagi yaitu sampai-sampai ada yang lebih memilih tak beragama dalam arti lain ateis. Padahal kenyataannya didalam Al-Qur'an sendiri mengharuskan perempuan berkembang dan bersosialisasi tetapi tetap harus memahami kodratnya sebagai perempuan.

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya identik namun tidak berarti setara. Laki-laki lebih banyak menggunakan akal nya sedangkan perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya. Sebagai manusia tentu kita harus lebih menghargai sesama makhluk, terutama makhluk yang dimuliakan serta lemah lembut, yaitu perempuan. Perempuan tetap memiliki hak-haknya sesuai dengan syariat islam tanpa harus mengikuti tren kebarat-baratan. Maka dari itu, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi.

Saat ini perempuan menjadi makhluk yang berada pada taraf sosial paling bawah. Perempuan menjadi objek penindasan yang paling menyiksa dari lahir

sampai batin. Bagaimana tidak, menjadi objek utama saat itu banyak perempuan-perempuan pribumi menjadi selir bahkan sebagai objek pemuas nafsu para penjajah. Bahkan jika laki-laki diperbolehkan untuk meneruskan pendidikan sedangkan perempuan tidak boleh karena persepsi saat itu perempuan pasti ujung-ujungnya akan berada di dapur, sumur, dan kasur.

Di era saat ini, budaya patriarki yang sebenarnya sudah menjadi masa lalu bangsa ini masih terpelihara, semakin meningkatnya kapitalisme di Indonesia juga semakin tingginya patriarki tersebut. Jika era penjajahan perempuan banyak dijadikan selir atau pemuas nafsu seks koloni, sekarang perempuan dijadikan objek iklan untuk menggoda para penonton agar beli produk-produk yang di iklankan. Bahkan mirisnya perempuan tersebut dipaksa untuk tampil berani dengan membuka lekuk tubuhnya untuk menggoda penonton. Perempuan dipaksa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, bukan untuk dipenuhi kebutuhannya.

Walaupun saat ini perempuan telah memperoleh hak pendidikan sampai pendidikan yang paling tinggi, namun inilah faktanya hegemoni persepsi patriarki di Indonesia susah untuk dihilangkan yang sudah menjadi pegangan erat masyarakat Indonesia. Dapat dilihat meski perempuan telah melakukan pendidikan sekalipun, namun ketika sudah menikah berumah tangga perempuan harus membagi perannya.

Dalam QS An-Nisa juga menjelaskan bahwa perempuan adalah makhluk yang mulia dan harus dihormati, bukan makhluk yang lemah dan harus ditindas sedemikian rupa. QS An-Nisa juga menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai hamba Allah. Keduanya diciptakan oleh Allah



dalam jiwa yang satu, artinya tidak ada perbedaan antara keduanya. Hanya amal ibadah lah yang menjadikan perbedaan disetiap makhluk dan perbedaan dalam hal fungsi peran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Maka Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dalam bentuk postur fisik yang berbeda dan emosionalnya.

Perempuan masih mengalami hambatan dalam menjadi pemimpin yang salah satunya dari faktor budaya yang berkembang di masyarakat yang kemudian berpengaruh ke budaya yang ada di birokrasi. Budaya yang melekat pada tata aturan hubungan di masyarakat secara umum bersifat patriarki walaupun ada beberapa daerah yang tidak bersifat patriarki.

Budaya patriarki juga berpengaruh pada pemahaman masyarakat bahwa sarana publik adalah wilayah kerja laki-laki. Faktor budaya adalah penyebab utama kiprah perempuan di ranah public secara umum berada pada posisi subordinat dari laki-laki. Faktor budaya memang menjadi sangat berpengaruh karena budaya yang telah tertanam sejak lama biasanya menjadi salah satu acuan dalam melakukan interaksi atau hubungan.

Dengan demikian, cara pandang tertentu tentang gender laki-laki maupun perempuan dalam hal kepemimpinan juga dipengaruhi oleh pola interaksi itu. Maka tidak mengherankan apabila ada kecenderungan bahwa ada birokrasi pemerintah masih ada nilai-nilai budaya patriarki yang terbawa dari kehidupan sosialnya.

Budaya patriarki yang telah dijelaskan diatas membawa banyak implikasi pada tataran kehidupan perempuan. Salah satunya adalah masih ada anggapan bahwa

perempuan mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Peran domestik perempuan telah tertanam dalam pola pikir masyarakat cenderung membuat perempuan tidak memiliki ruang bebas di ranah publik.

Perempuan masih diidentik dengan peran domestiknya dan juga berkarir di ranah publik maka terjadi beban ganda yang dapat menghambat perkembangan karir perempuan. Beban ganda disini merujuk pada kondisi dimana perempuan harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu serta melakukan pekerjaan lain dibidang kerjanya.

Dalam kewenangan yang dimiliki birokrasi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berarti birokrasi pemerintah daerah membuat peraturan-peraturan daerah yang menjadi sumber hukum pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Birokrasi pemerintah daerah melaksanakan sendiri peraturan-peraturan yang dibuatnya, maupun urusan lain yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pelayanan publik, tidak hanya dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pejabat atau elite politik daerah, tetapi harus justru memaknai sebagai tanggung jawab daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada birokrasi pemerintah daerah untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya. Dengan memaksimalkan potensi dan kebutuhan daerah.

Oleh karena itu, birokrasi pemerintah daerah harus memahami betul segala apa saja yang menjadi potensi dan kebutuhan daerah dengan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah dan pembangunan

daerahnya. Dengan demikian, adanya otonomi daerah akan memperkuat aplikasi pengetahuan local dan kejeniusan local dari kearifan local dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus didukung oleh pengetahuan, kepehaman, dan kejeniusan birokrasi pemerintah dan masyarakat daerah untuk mengembangkan potensi dan kebutuhan daerahnya. Kepehaman merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan lebih besar dari hak-hak masyarakat dan hak-hak pribadi demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah salah satu urgensi, mengapa birokrasi pemerintah daerah dituntut dan perlu memahami nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di daerahnya.

Terkait dengan kepemimpinan perempuan dan birokrasi rupanya selalu menarik untuk dibicarakan karena pada dasarnya kepemimpinan memiliki peran yang penting dalam sebuah birokrasi. Kepemimpinan terus mengalami perkembangan seiring dengan berbagai perubahan dan kebutuhan lingkungan. Saat ini, kepemimpinan juga tidak lagi identik dengan peran laki-laki, tetapi perempuan juga sudah ada yang menjadi pemimpin.

Pemimpin baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki masing-masing kekhasan karakteristik dalam memimpin. Hal tersebut membawa implikasi pada variasi kepemimpinan yang dijalankan dan dampak pada orang atau situasi yang dipimpinnya. Peran seorang pemimpin apapun jenis gendernya, pada akhirnya menjadi titik sentral dalam menentukan arah untuk mencapai tujuan tertentu.

Hambatan yang membuat perempuan tidak hanya memainkan perannya pada posisi strategis sebagai pemimpin dan pengambil keputusan, khususnya

dibirokrasi lokal. Hal tersebut berawal dari ditemukannya fenomena tentang adanya kecenderungan kemajuan yang dialami oleh perempuan. Kini perempuan sudah banyak yang bekerja diluar ranah domestik. Perkembangan pemikiran manusia dalam hal ini juga menjadi factor pendorong yang menyebabkan perempuan mengalami banyak kemajuan.

Berbagai kemajuan yang dimiliki perempuan terlihat belum bisa menandingi kaum laki-laki, terutama dalam hal kepemimpinan. Terkait proporsinya, peran perempuan sebagai pemimpin memang masih tertinggal jauh. Selama ini konsep kepemimpinan lebih banyak identik dengan laki-laki, maka dari itu laki-laki cenderung dianggap lebih unggul dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Namun bukan menjadi hal yang mustahil jika perempuan juga memainkan perannya sebagai pemimpin.

Meskipun demikian, pada kenyataannya sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa kaum perempuan haram menjadi pemimpin. Dan ada sebagai orang yang berpendapat bahwa kemampuan laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan. Padahal banyak sekali perempuan-perempuan yang mempunyai potensi yang tidak kalah dengan laki-laki. Akan tetapi citra perempuan masih saja melekat dalam citra perempuan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman. Citra perempuan hanya sebagai kanca wingking sudah mulai memudar karena banyak perempuan yang mempunyai jabatan dan kedudukan yang sejajar dengan laki-laki baik itu dibidang pemerintahan, masyarakat dan sebagainya.

Kepemimpinan perempuan belum bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi masalah yang krusial. Persoalannya tidak hanya menyangkut masalah politik, yaitu

ketika pemimpin harus dipilih secara langsung oleh rakyat yang berarti disana ada pro-kontra tetapi juga menyangkut perbedaan paham keagamaan terutama dikalangan umat islam yang sekaligus juga menyangkut persoalan gender.

Seiring dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan di era global saat ini, perempuan juga telah mengambil langkah maju bagi dirinya sendirinya, salah satu langkah maju yang diambil perempuan adalah dengan bekerja, yang biasanya hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Peran perempuan dalam dunia kerja sama besarnya dengan peran laki-laki.

Perempuan dalam dunia kerja sudah tidak asing lagi. Namun sayangnya di Kota Makassar yang masih mengikuti aturan dan stereotype tradisional, peran perempuan dalam dunia kerja masih terbatas. Perempuan masih dianggap tidak pantas dan tidak setara dengan kemampuan laki-laki dalam hal bekerja. Pekerjaan yang dilakukan perempuan di Kota Makassar masih banyak dibidang pelayanan jasa, publik, dan posisi mereka dalam perusahaan hanya menempati posisi manager menengah kebawah.

Masih melekatnya stereotype tradisional pada perempuan dalam hal pekerjaan menjadikan perempuan sulit menembus posisi puncak perusahaan. Posisi-posisi yang ditawarkan untuk perempuan pun cenderung dibawah laki-laki, dimana perempuan tidak mempunyai kuasa atau hak tertentu dalam perusahaan.

Dalam kehidupan, ada dampak yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan jenis gender yaitu posisi yang timpang. Ketimpangan gender ini adalah sebuah kondisi dimana ada salah satu jenis gender yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan jenis gender yang lain. Maka dari itu kondisi yang

tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan adalah hasil dari konstruksi pemikiran masyarakat itu sendiri.

Konstruksi pemikiran masyarakat itu sendiri dipicu oleh adanya stereotype gender yang berisikan kesan atau keyakinan tentang perilaku apa yang tepat untuk dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender mengakibatkan lahirnya sifat stereotype yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan tuhan.

Sedikitnya perempuan yang dapat mencapai posisi tinggi jabatan menandakan bahwa ada halangan tertentu bagi perempuan untuk mencapai posisi tersebut. Halangan tersebut mengenai hambatan yang dialami perempuan dan kaum minoritas dalam mencapai posisi puncak dalam hirarki organisasi. Ada tiga hambatan bagi perempuan dan kaum minoritas untuk mencapai posisi puncak, yaitu hambatan social, hambatan struktur internal, dan hambatan pemerintah.

Hambatan tersebut banyak merugikan perempuan yang mana dimana sekalipun mereka mempunyai pendidikan yang lebih tinggi atau kemampuan yang sama dengan laki-laki tapi mereka tidak dilihat mempunyai kemampuan yang sama dalam posisi puncak perusahaan. Sekalipun kepemimpinan perempuan lebih baik dalam beberapa hal, hal ini tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin perusahaan.

Banyak alasan yang menjadikan perempuan mundur atau tidak dapat mencapai posisi puncak pemerintahan, salah satunya kerana adanya tekanan berupa tekanan kerja yang nantinya dapat mempengaruhi keseimbangan kehidupan pribadi. Tekanan karena tidak adanya pembimbing atau sedikitnya teman perempuan yang

memiliki posisi yang sama, dan tekanan akan mengurus hal lainnya di luar pemerintahan yang masih menjadi tanggung jawab perempuan seperti anak dan keluarga.

Kota Makassar adalah Kota yang memiliki beberapa Kelurahan didalamnya salah satunya terletak di Kelurahan Antang adalah kelurahan yang dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Bapak Amanda Syahwaldi menjabat sebagai kepala Kelurahan Antang dan sudah hampir satu periode ini. Dapat kita lihat pemerintah di birokrasi lokal yang ada di kelurahan Antang dimana kelurahan tersebut dipimpin oleh seorang laki-laki. Di Kelurahan Antang tidak hanya pemimpinnya laki-laki tetapi perangkat kelurahan juga dikerjakan dan dijalankan oleh perempuan. Perempuan juga ikut berperan aktif dalam pembangunan. Akan tetapi, yang menjadi pendobrak utama mempunyai ide dan keterampilan baik dalam organisasi maupun pekerjaan yaitu perempuan.

Banyak perubahan yang terjadi di kelurahan antang. Seperti akses jalan yang sudah lumayan bagus dari sebelumnya. Kantor kelurahan Antang pun dibuat nyaman-nyamannya, serta bantuan-bantuan pemerintah lainnya.

Bapak Amanda Syahwaldi dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, peduli terhadap masyarakat, sangat ramah dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia selalu membaaur kepada masyarakat dan tidak segan-segan ikut berpartisipasi dalam setiap acara warga. Ia juga sering memberikan bantuan untuk warga yang mendapat musibah, itulah yang membuat warga senang dengan kepemimpinan yang dipimpin olehnya. Tetapi masa kepemimpinannya tidak terlepas dari bantuan bawahannya yang didominasi oleh perempuan.

Dengan melihat latar belakang diatas penulis ingin mengupas lebih mendalam tentang "**Isu Patriarki Pada Perempuan dalam Birokrasi Lokal ( Studi kasus Di Kelurahan Antang Kota Makassar)**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah isu patriarki pada perempuan dalam birokrasi Kelurahan Antang Kota Makassar?
2. Bagaimana eksistensi perempuan pada ruang public di Kelurahan Antang Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah menemukan rumusan masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui isu patriarki pada perempuan dalam birokrasi di Kelurahan Antang Kota Makassar!
2. Untuk mengetahui eksistensi perempuan yang ada di ruang public di Kelurahan Antang Kota Makassar!



## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat maupun sumbangsi bagi peneliti maupun bagi masyarakat pada umumnya. Terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan social. Adapun manfaat yang diharapkan bagi peneliti ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pemahaman dan pengetahuan bagi ilmu sosiologi khususnya sosiolog gender serta memberikan sumbangsih dalam ilmu social
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai patriarki dan isu-isu kesetaraan gender pada perempuan dalam birokrasi

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya
- b. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut dan sebagai data dasar bagi perkembangan system pendidikan guna terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

## **E. Definisi Operasional**

1. Patriarki adalah sebuah system social yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi social. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat

system ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan

2. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.
3. Birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada dirantai paling bawah dari pada tingkat atas. Biasanya ditemukan pada instansi yang sifatnya administrasi maupun militer.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh (Rike Anggun Artisa:2014), dengan judul "Perempuan dalam Birokrasi", pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa saat ini peran dan kontribusi perempuan dalam birokrasi sudah kian meningkat, hal tersebut dapat terlihat dari bertambahnya jumlah pegawai perempuan dalam birokrasi pemerintah provinsi DIY. Namun peningkatan itu nyatanya cenderung terjadi pada level staf dan hanya sedikit yang berada pada level pimpinan atau pengambil keputusan.

##### **2. Konsepsi Patriarki dan Perempuan**

###### **a. Konsep Patriarki**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.

Patriarki adalah tatanan kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak (KBBI:2001). Secara etimologi, patriarki berkaitan dengan system social, dimana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya serta sumber-sumber ekonomi. Ia juga membuat semua keputusan penting bagi keluarga. Dalam system social, budaya dan juga keagamaan,

patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideology bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya disbanding perempuan.

Patriarki juga dapat dijelaskan dimana masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan social, budaya, dan ekonomi.

Sejarah menggambarkan bahwa interaksi social antara laki-laki dan perempuan merupakan interaksi kesetaraan, namun bergeser menjadi hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Dalam proses historis yang panjang, hegemoni tersebut memperoleh legitimasi dari nilai-nilai social, agama, budaya. (Kadarusman. 2005. 22).

Di Negara-negara barat, eropa barat termasuk Indonesia, budaya dan ideology patriarki masih sangat kental mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat. Bila dilihat secara garis besar, mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat yang patrilineal yang dalam hal ini, posisi ayah atau bapak (laki-laki) lebih dominan dibandingkan dengan posisi ibu (perempuan)

Menurut Sastryani (dalam Aritonang, 2010) patriarki adalah system pengelompokan masyarakat social yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak.

Menurut Pinem (dalam Aritonang, 2010) patriarki juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan social,

budaya, dan ekonomi. Di Negara-negara barat, eropa barat termasuk Indonesia, budaya dan ideology patriarki masih sangat kental mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat. Bila dilihat dari garis keturunan masyarakat lebih cenderung sebagai masyarakat yang patrilineal yang dalam hal ini posisi ayah atau bapak (laki-laki) lebih dominan dibandingkan dengan posisi ibu (perempuan). Contoh suku yang menganut factor budaya patriarki adalah batak, melayu, dan nias.

Pada tatanan kehidupan social, konsep patriarki sebagai landasan ideologis, pola hubungan gender dalam masyarakat secara sistematis dalam praktiknya dengan pranata-pranata social lainnya. Factor budaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan terlalu diprioritaskannya laki-laki.

Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat patriarki, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.

Sikap masyarakat patriarki yang kuat ini mengakibatkan masyarakat yang kuat ini mengakibatkan masyarakat cenderung tidak menanggapi atau berempati terhadap segala tindak kekerasan yang menimpa perempuan. Sering dijumpai masyarakat lebih banyak komentar dan menunjukkan sikap yang menyudutkan perempuan.

## b. Konsep Perempuan

Dalam sosiologi, perempuan sebagai suatu objek studi banyak diabaikan. Hanya dibidang perkawinan dan keluarga ia dilihat keberadaannya. Kedudukannya dalam sosiologi, dengan kata lain, bersifat tradisional sebagaimana ditugaskan kepadanya oleh masyarakat yang lebih besar, tempat kaum perempuan adalah di rumah. Dalam hal ini bukan kejutan yang diberikan oleh pengaruh ilmu pengetahuan dengan landasan patriarkatnya pada sosiologi. (Ollenburger & Moore, 2002. 1).

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah perempuan dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Awalnya hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam menjalani perintah Tuhan di Dunia ini. Pada cerita Adam dan Hawa pertama kali diturunkan ke bumi, perempuan sudah dimaknai sebagai biang masalah. Diceritakan bahwa Hawa merupakan penyebab mereka turun ke Dunia, dikarenakan Hawa tergoda bujuk rayuan setan yang menyuruhnya untuk mengambil buah khuldi (buah yang dilarang untuk dimakan). Hawa dan Adam yang memakannya langsung diperintahkan untuk turun ke dunia. Cerita inilah yang menjadi salah satu wacana yang selalu dibicarakan terkait dengan perempuan biang keladinya masalah.

Perempuan secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, meskipun di dalam kehidupan social selalu dinilai sebagai *the other sex* yang sangat menentukan mode representasi social tentang status dan peran

perempuan. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi *the second sex* seperti juga sering disebut sebagai "warga kelas dua" yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Dokotomi *nature* dan *Culture*, misalnya, telah digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan statifikasi diantara dua jenis kelamin ini, yang satu memiliki status lebih rendah dari yang lain. Perempuan mewakili sifat "alam" *nature* harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya *cultur*. Usaha "membudayakan" perempuan tersebut telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi dari konsep dan *common sense* tentang pemosisian yang tidak seimbang telah menjadi kekuatan didalam pemisahan sector kehidupan kedalam sector "domestik" dan "publik" dimana perempuan dianggap orang yang berkiphrah dalam sector domestic sementara laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sector publik. (Irwan Abdullah, 2006. 3-4).

Didalam istilah simone de Beauvoir, "perempuan tidak dilahirkan, mereka dibuat." Sama dengan apa yang terjadi pada laki-laki. Terciptanya seorang laki-laki atau seorang perempuan merupakan semacam proses tanpa henti yang dimulai sebelum terjadinya kelahiran, dimulai dari ketika orang membayangkan apakah bayi yang dikandung berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ritual yang berjalan puntidak lebih merupakan perjalanan dari seorang yang tidak memiliki jenis kelamin (bahasa inggris: *it*) sampai menjadi laki-laki (*he*) atau perempuan (*she*) (Judith Butler. 1993. *Bodies That Matter: On The Discursive Limits of sex*. New York and London: Routledge), sebagai

status seumur hidup baginya untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Pelabelan semacam ini dibuat menjadi umum adanya dan bahkan bertahan melalui salah satu aktifitas kebahasaan yaitu pemberian nama. (Sugihastuti & Saptiawan, 2010. 13-14).

### **3. Konsep Ketidakadilan Gender**

#### **a. Konsep Gender**

Secara sederhana gender dapat diartikan, perbedaan peran laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi social dari budaya yang diyakini oleh suatu masyarakat yang selanjutnya membentuk identitas laki-laki dan perempuan serta pola perilaku yang menyertainya. Pengertian ini memberikan ruang yang sangat dominan terhadap dinamika social budaya masyarakat untuk turut mempengaruhi perbedaan peran laki-laki dan peran perempuan. (Nugroho, 2008:19)

Gender sendiri dipahami sebagai sebuah konstruksi social tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh system dimana keduanya berada. Dalam kenyataan konstruksi social ini dikonstruksikan oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, social, cultur, bahkan fisik karena sebagaimana halnya kenyataan kekuasaan adalah identik dengan kepemimpinan. Salah satu tugas kekuasaan dan parallel dengan tugas kepemimpinan adalah membawa kelompoknya kedalam sebuah masa depan yang baru dan lebih baik. Tugas ini bukan saja bermakna bahwa tugas



pemimpin adalah membuat visi, misi, dan strategi bagi kelompoknya, melainkan juga mendefinisikan konsep-konsep dasar bagi kelompoknya.

Istilah "gender" dengan pemaknaan seperti dikemukakan diatas pertama kali diperkenalkan oleh Stoller (1968). Untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat social budaya dengan pendefinisian yang bersal dari cirri fisik biologis. Dewasa ini dikenal beberapa teori gender, antara lain: teori *nurture*, teori *nature*, teori *equilibrium*, dan *syndrom cindrella complex*.

Teori *Nurture* memandang perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil kontruksi social budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kontruksi social menempatkan perempuan dan laki-laki berbeda dalam banyak hal.

Teori *Equilibrium*, menitikberatkan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Keduanya dipandang harus bekerjasama dalam kemitraan yang harmonis dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan bernegara. Keragaman peran disebabkan karena adanya berbagai factor, antara lain: biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan atau budaya yang pada hakekatnya merupakan realitas kehidupan manusia. Konsep gender ini digunakan untuk melihat posisi perempuan dalam birokrasi yang pada dasarnya perempuan berada dalam posisi kedua seperti budaya patriakat yang kepemimpinan perempuan di ragukan keberadaannya.

Sejarah yang memandang bahwa perempuan berada diposisi kedua masih menjadi permasalahan yang kompleks dalam pemerintahan.

b. Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender yang berlaku pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan gender yang dominan masih dirasakan oleh perempuan dan termanifestasi kedalam beberapa bentuk yaitu:

1) Gender dan Marginalisasi Perempuan

Bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah proses pemiskinan/peminggiran yang menyebabkan kemiskinan terhadap jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan yang disebabkan oleh perbedaan gender (Narwoko & Suyanto 2010:341). Sebagai contoh, pekerjaan khusus perempuan seperti: guru kanak-kanak dan pekerjaan pabrik mengakibatkan perempuan diupah dengan rendah.

2) Gender dan Subordinasi Pekerjaan Perempuan

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan tidak penting terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan tersubordinasi oleh factor-faktor yang dikonstruksikan secara social. Pembagian peran gender merupakan salah satu factor utama yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Anggapan sementara perempuan itu irasional dan emosional sehingga perempuan tidak cocok untuk memimpin dan tidak penting.

3) Gender dan stereotype atas pekerjaan perempuan

Stereotype adalah pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotype gender telah memberikan pelabelan negative terhadap perempuan. Hal ini disebabkan oleh pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki adalah manusia yang kuat, rasional, jantan, berani, dan perkasa. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lembut, cantik, emosional, dan keibuan.

Dengan munculnya pelabelan seperti diatas tentu saja akan muncul banyak stereotype yang dikonstruksi secara social sebagai hubungan social tentang perbendaan laki-laki dan perempuan. Oleh karena sifat lemah lembut dan keibuannya perempuan sering diidentikkan dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Akibat adanya stereotype ini banyak tindakan-tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat.

#### **4. Patriarki dan perempuan dalam birokrasi**

##### **a. Konsepsi Birokrasi**

Istilah birokrasi dari bahasa Prancis "*bureau*" yang berarti kantor, meja, tulis, dan kata Yunani "*kratein*" yang berarti mengatur (M. Mas'ud Said, 2007:1). Menurut Max Weber (seperti yang dikutip M. Mas'ud Said, 2007:1) menyatakan, birokrasi adalah system administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

Max Weber menyatakan bahwa terdapat tiga macam *'legitimate domination'* yang menunjukkan dalam kondisi seperti apa sehingga seseorang atau sekelompok orang mampu mendominasi sejumlah besar orang lainnya. Ketiga macam *legitimate domination* tersebut adalah: tradisional domination, charismatic domination, dan legal-rational domination.

1) Tradisional Domination (dominasi tradisional)

Dominasi ini mendasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian legitimasi yang diperoleh elit tentu saja didasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku. Dalam dominasi tradisional dapat ditemukan massa dengan kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi yang ada. Sehingga pada gilirannya individu-individu yang terpilih sebagai pemimpin yang berkuasa bukan dilihat dari charisma atau kemampuan yang dimilikinya, tetapi semata-mata atas dasar kesepakatan bersama anggota-anggota masyarakat yang sudah mentradisi.

2) Charismatic Domination (dominasi karismatik)

Dominasi yang mendasarkan pada charisma yang melekat pada diri seseorang. Perihal charisma, Weber memberi pengertian sebagai suatu sifat tertentu dari suatu kepribadian seorang individu berdasarkan mana orang itu dianggap luar biasa dan perlukan sebagai seseorang yang mempunyai sifat unggul atau paling sedikit dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa.

3) Legal-Rational Domination

Pada hakekatnya didasarkan pada kesepakatan anggota masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. Individu yang berperan sebagai elit di masyarakat yang memberlakukan dominasi tipe ini diakui keberadaannya atas kemampuan yang dimilikinya dan persyaratan menurut peraturan yang berlaku.

Sebagai akibat dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka individu-individu yang tidak memiliki kemampuan akan sulit untuk dapat menduduki posisi tertentu sebagai elit. Hanya individu-individu yang mempunyai kemampuan dan dipandang telah memenuhi persyaratan yang bisa mendapatkan legitimasi.

Menurut Weber tipe ideal birokrasi itu ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional.

#### b. Peran perempuan dalam birokrasi

Perempuan kiprahnya selalu dipersoalkan dalam tatanan masyarakat yang masih memegang budaya patriarki. Perempuan sering kali dianggap sebagai pelengkap dalam berbagai aktifitas dan relasi social. Perempuan tidak pernah direstui tampil menjadi pemimpin dalam bidang kerja yang digeluti. Demokrasi yang memungkinkan adaptasi nilai-nilai kesetaraan gender diruang public, penerapannya masih berjalan setengah-setengah dalam menyetarakan posisi perempuan dengan laki-laki. Perempuan tetap mengalami fase marginalisasi diruang public.

Dalam lingkup birokrasi, perempuan masih dianggap sebagai kanca wingking dalam relasi kerja yang masih kentara menempatkan dominasi peran laki-laki. Wujudnya, acap kali karier perempuan buntu ketika menjelajahi jalan menuju pucuk pimpinan birokrasi. Hanya sedikit perempuan yang mampu menapak menjadi kandidat pemimpin di lingkungan birokrasi pemerintahan, apalagi menjadi pimpinannya.

Hal tersebut menjadi persoalan dalam mengakomodasi program kesetaraan gender dalam tata kelola pemerintahan. Ada beberapa fakta menyangkut representasi perempuan didalam birokrasi pemerintah. Pertama, perempuan sulit meraih posisi tertinggi karier birokrasi karena status keperempuanannya. Dalam tata kelola pemerintahan local, terutama di daerah, sangat sulit atau bahkan mustahil perempuan mampu berkompetisi meraih jabatan puncak birokrasi .penyebabnya, kultur feodelisme dan patriarki yang masih menjadi domain kekuasaan kaum laki-laki.

Kedua, secemerlang karir dan sekeras apa pun kerja perempuan masih tidak dianggap "pas" dan ideal apabila menjadi sosok pemimpin dalam birokrasi. Stereotip gender menempatkan perempuan seolah tidak memiliki karakter yang kuat dan mumpuni sebagai pemimpin. Perempuan diidealkan sekadar sebagai pamong praja yang mengurus persoalan administrasi.

Ketiga, perempuan terhambat persoalan "biologis" dan definisi seksualitasnya karena kontruksi social menyebabkan waktu mereka sering tersita oleh problem domestik. Hal tersebut dianggap sebagai kendala meraih jenjang karir bagi perempuan.

Banyak daerah pada era otonomi daerah belum mengakomodasi program tata kelola pemerintahan local yang berparadigma keadilan gender. Andai pun paradigma tata kelola pemerintahan lokal dan birokrasi dijalani mendekati gagasan keadilan gender, praktiknya masih setengah hati. Tidak ada keikhlasan dari para laki-laki yang lebih mendominasi jenjang karir member "jalan tol" bagi pemuliaan karir perempuan.

Gender dan tata kelola pemerintahan lokal menyajikan data ironis. Perempuan bisa mencapai karir politik birokrasi melalui kompetisi demokratik semacam pemilihan kepala daerah langsung, tetapi tidak mungkin sangat jarang mampu meraih puncak karir sebagai pemimpin administrasi dan kebijakan pemerintah di daerah. Dengan kata lain, banyak perempuan bisa meraih posisi sebagai bupati/gubernur/wali kota melalui pilkada langsung, tetapi sedikit atau minimal yang bisa menjadi sekretaris daerah.

Hal tersebut menunjukkan, perempuan dalam lingkup kerja birokrasi di banyak daerah belum dianggap sebagai mitra sejajar, melainkan sebagai saingan para abdi Negara berkelamin laki-laki. Kultur kesetaraan yang substansial dan bukan wacana belum dijalani oleh tata kelola birokrasi walaupun masyarakat pemilih tak melihat ada kendala perempuan menjadi pemimpin.

Birokrasi yang memiliki ikatan secara kolonialis mataraman masih mengedepankan superioritas laki-laki. Masih kuat anggapan tidak adil gender di daerah bahwa laki-laki adalah pemimpin, memiliki kekuatan mengendalikan berbagai sumber daya manusia, dan memiliki talenta

kepemimpinan birokrasi yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan perempuan.

Hal tersebut akan memandulkan potensi dan ekspresi talenta kepemimpinan perempuan. Sudah waktunya situasi tersebut diakhiri dengan perubahan kultur dan kebijakan struktural yang pro keadilan gender. Kultur kesetaraan adalah keniscayaan apabila masyarakat dan para pengelola Negara memiliki keinginan kuat memajukan fungsi birokrasi sebagai institusi pengembalian amanat pelayanan publik.

Semangat pelayanan publik sendiri dalam dimensi filosofis sangat selaras dengan karakter perempuan. Perempuan adalah sosok kolektif yang memiliki jiwa pamong yang bisa "mengasuh" apa yang ditempatkan sebagai kepentingan masyarakat. Perempuan sebagai pemimpin birokrasi administrasi memiliki nilai lebih karena mampu memahami apa yang dinamakan perasaan publik. Perasaan publik tentang kepuasan akan pelayanan birokrasi yang menjadi salah satu tolak ukur persepsi kinerja birokrasi dalam pandangan masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan era otonomi daerah.

Bahkan baru-baru ini dunia telah memperingati *Internasional women's day*, Indonesia termasuk yang berkontribusi dalam perayaan hari internasional perempuan. Sejumlah tuntutan diteriakkan oleh perempuan salah satunya adalah kampanye tentang kesetaraan hak dan perlindungan atas kaum perempuan.

Di Indonesia deretan mengenai kekerasan dan masalah perempuan menjadi catatan yang cukup panjang, mulai dari kekerasan rumah tangga, perlindungan



social terhadap perempuan, perlindungan terhadap buruh migrant perempuan dan jaminan social terhadap pekerja perempuan menjadi salah satu problem yang harus segera ditangani oleh Negara.

Selain itu, isu yang seringkali luput perhatian adalah tentang keterlibatan perempuan dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Isu perempuan seringkali terjebak pada stigmanisasi feminis yang secara struktural membatasi perempuan dalam agenda-agenda besar termasuk pada reformasi birokrasi, sementara disatu sisi demokrasi memberikan persamaan hak tanpa membedakan jenis kelamin. Bagaimana peran perempuan dalam reformasi birokrasi dan mengapa peran perempuan masih sangat minim dalam reformasi birokrasi.

Minimnya peran perempuan terhadap reformasi birokrasi disebabkan oleh beberapa hal, pertama karena faktor structural. Di Indonesia budaya birokrasi sangat didominasi oleh faktor paternalistik. Gagasan terhadap reformasi birokrasi cenderung di dominasi pada karakter yang sangat maskulin dalam artian bahwa birokrasi masih sangat didominasi oleh lelaki, selain itu birokrasi cenderung diposisikan sebagai sesuatu yang sangat struktural dan kaku.

Misalnya pada pembagian kerja yang seringkali masih didominasi oleh klasifikasi jenis kelamin yang implikasinya berujung pada pembagian kerja antara pekerjaan yang harus dikerjakan oleh perempuan dan pekerjaan yang boleh dikerjakan oleh lelaki. Secara teortik, hambatan pada feromasi birokrasi yang disebabkan oleh factor keperempuanan dan kelaki-lakian merupakan

fenomena dari adanya standarisasi pada organisasi birokrasi yang berbasis jenis kelamin.

Hambatan selanjutnya disebabkan oleh faktor tipe ideal birokrasi. Birokrasi akan bertolak belakang dengan peran dan keterlibatan perempuan dalam reformasi birokrasi. Peran perempuan pada reformasi birokrasi dianggap keluar dari konsep rasional karena mengedepankan karakter kultural yang feminis sementara itu birokrasi mengedepankan karakter rasional maskulin yang mencerminkan ciri paternalistik.

Birokrasi kita terjebak pada konsep rasionalitas. Sementara secara cultural kontes tidak semuanya relevan dengan kondisi yang dihadapi. Implikasinya, perempuan tidak punya banyak ruang untuk akselerasi hak politik, sementara isu dan problem perempuan seringkali dikesampingkan oleh Negara sembari disatu sisi kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan terus meningkat.

Birokrasi yang harusnya menjadi organisasi publik dan menyuarakan isu perempuan pun tidak bisa berbuat banyak karena faktor cultural. Akibat diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan akan menjadi pelampiasan bagi birahi "maskulin" (berunjuk pada laki-laki), karena ketimpangan hak secara politik melegitimasi terjadinya kekerasan tersebut.

Selain itu, kepentingan-kepentingan bagi perempuan akan semakin redup karena hak politik yang sejak awal telah dikebiri. Imbasnya peran perempuan hanya menjadi subjek pasif dalam birokrasi tanpa bisa berbuat banyak. Birokrasi dengan karakter paternalistic kemudian akan mengakar menjadi birokrasi yang maskulin dengan mengenyampingkan kepentingan-kepentingan

perempuan sebagai warga Negara yang harusnya memiliki persamaan hak antara lelaki dan perempuan.

Kedepannya agenda besar reformasi birokrasi harus menempatkan perempuan sebagai salah satu actor yang bertindak secara aktif. Posisi perempuan pada birokrasi tidak lagi sebagai subjek yang pasif tetapi harus di transformasikan menjadi subjek yang aktif. Ruang aktualisasi bagi perempuan harus diperbanyak sembari membangun konsolidasi birokrasi yang bersinergi dengan kultural yang paternalistik.

Kedudukan ini menempatkan perempuan sebagai salah satu actor kunci dalam menentukan arah reformasi birokrasi sehingga ciri paternalistik dengan karakter yang sangat kultural tidak lagi mendominasi birokrasi tetapi lebih kepada birokrasi fleksibel. Misalnya pada pembagian kerja yang tidak lagi harus menggunakan klasifikasi jenis kelamin tetapi lebih kepada potensi dan skill yang dimiliki.

Peran perempuan dalam birokrasi harus diposisikan pada kerangka teoritik dengan menempatkan konsep feminis pada birokrasi (administrasi publik). ini dilakukan dengan cara mendefinisikan ulang konsep birokrasi dengan pendekatan feminisme. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan *depersonalisasi* kekuasaan pada birokrasi yaitu sebuah pendefinisian birokrasi dengan pendekatan gender bahwa karakter birokrasi harus berbasis pada gender serta instrument kerja birokrasi yang disusun harus berkarakter gender.

Pendekatan peran birokrasi berbasis gender dengan depersonalisasi kekuasaan birokrasi berangkat pada dasar filosofi yang menunjukkan bahwa

keberadaan birokrasi harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Untuk itu pembagian kerja pada birokrasi tidak harus terjebak pada instrumen jenis kelamin antara lelaki dan perempuan yang sangat personal tetapi yang harus dikedepankan adalah pembagian kerja dengan instrumen yang lebih substansial seperti keahlian, profesionalitas, kemampuan managerial etika dan tanggung jawab.

## **5. Perempuan dalam Realitas Birokrasi**

Perempuan pada abad ke 21 mempunyai ideologinya sendiri, yang dikenal dengan feminisme. Feminisme sebagai suatu kumpulan pemikiran, pendirian dan aksi berangkat dari kesadaran, asumsi dan kepedulian terhadap ketidakadilan, kesetaraan, penindasan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi.

Dalam perkembangan selanjutnya gerakan feminisme juga memproyeksikan suatu visi masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera menurut perspektif feminisme. Dalam konteks inilah feminisme dapat dikategorikan sebagai salah satu teori perubahan sosial alternatif. Semua feminisme berangkat dari kesadaran akan diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan. Dan semua aliran feminis, dalam perkembangan selanjutnya, mulai memfokuskan pada analisis bahwa salah satu dari berbagai teori yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan maupun ketidaksetaraan atau bahkan kesengsaraan

terhadap kaum perempuan itu merupakan implikasi dari kebijakan pembangunan dan kebijakan Negara.

Meskipun feminisme sebagai gerakan pemikiran sesungguhnya telah lama muncul, namun dalam kaitanantara feminisme sebagai teori perubahan social dan pembangunan merupakan gejala baru, tepatnya ketika gerakan feminisme merespon dan melakukan kritik terhadap teori pembangunan yang berkembang pesat sekitar 1976.Latar belakang perkembangan teori perubahan social dan kritik terhadap teori pembangunan dari perspektif feminisme ini dicetuskan pada suatu konferensi tentang pengintegrasian kaum perempuan dalam ekonomi.

Disamping bentuk Negara yang beragam, kebijakan-kebijakan Negara pun mempengaruhi kedudukan social perempuan, dan melalui praktek-praktek ekonomi, politik, dan hokum. Kebijakan-kebijakan tertentu menentukan seberapa besar control perempuan atas kehidupan mereka sendiri. Kebijakan Negara juga mengatur masalah seksualitas dan fertilitas, melalui mekanisme seperti undang-undang perkawinan, peraturan-peraturan hokum mengenai perkosaan, aborsi, pelacuran dan homoseksual, dan program-program pengendalian pertumbuhan penduduk.Analisi feminis tentang Negara telah berkembang melalui berbagai pendekatan.Penekanan pertama ditujukan pada aspek-aspek kesejahteraan Negara, dan bagaimana Negara memberi dan mengontrol kaum perempuan.

Di Negara sosialis, jelas bahwa meskipun ada persamaan hokum, otonomi ekonomi relative, dan komitmen Negara sosialis pada partisipasi penuh

perempuan dalam kehidupan ekonomi, social, dan politik, perempuan dan laki-laki tidak menduduki relasi yang sama dalam Negara. Perempuan mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara, tetapi mereka tidak dapat menerapkan hak yang sama. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sedikit pengaruhnya terhadap kebijakan Negara. Kebijakan mereka dalam rezim sosialis tidak sama dengan kedudukan kelompok-kelompok "minoritas" rasial, etnis, dan agama, yang didiskriminasi dan sering dianiaya. Perempuan sebagai golongan sebenarnya mendapatkan dukungan Negara, tetapi masih belum meraih keuntungan atau setidaknya sebagian keuntungan, dari dukungan tersebut. Dalam masyarakat sosialis, Negara modern terlibat pada upaya mempolitisasi peranan perempuan dan laki-laki, untuk hidup sesuai yurisdiksi Negara.

Hal menarik ialah bahwa tidak ada satupun dari berbagai bentuk Negara yang dikenal, baik Negara itu kuno, asli atau modern, mempolitisir peranan perempuan sedemikian rupa, sehingga lebih memberi perempuan persamaan *de facto* dan *de jure*. Data perbandingan menunjukkan bahwa di Negara-negara yang menjunjung dan mendukung emansipasi dan partisipasi politik perempuan pun, baik lembaga-lembaga kekuasaan Negara, maupun peranan-peranan politik, tetap didominasi oleh kaum laki-laki.

## **6. Perempuan dalam Dinamika Birokrasi**

Perempuan mengalami ketidakadilan dalam bidang social, ekonomi, dan birokrasi yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban

manusia. Ketidakadilan yang dialami perempuan khususnya di birokrasi dipandang oleh kaum feminis dan pejuang kesetaraan dan keadilan gender sebagai persoalan yang krusial, dan didasari hal itu mengakibatkan kaum perempuan hingga pada abad millennium ini masih ketertindasan baik dibidang birokrasi maupun domestic. Pembagian ruang public yang lebih dominan kaum laki-laki dan ruang public untuk perempuan telah dengan sangat berhasil membagi dikotomi dua wilayah peran yang mempengaruhi aktivitas lainnya termasuk birokrasi.

Kaum perempuan belum menjadi bagian aktif dari proses kerja katif dalam mengonstruksi peradaban. Perempuan belum menjadi penggagas sejarah (*historical bloc*), tetapi cenderung hanya menjadi bagian alamiah semata dan proses sejarah tersebut mengalami hegemonisasi oleh kaum laki-laki. Salah satu indicator yang dapat dilihat secara jelas dibidang birokrasi, yang mana perempuan berada dalam posisi keterpinggiran dan marginal dari proses birokrasi yang berlangsung, proses birokrasi yang diyakini oleh kaum perempuan pejuang 30% merupakan sarana yang mampu mengubah ideology dan hegemoni termasuk beragam kebijakan public. Hal itu disadari atau tidak adalah bagian dari hegemoni dominan dan ideology dominan laki-laki yang selama ini sangat mengauasai realitas dunia, khususnya birokrasi dan kekuasaan.

Hegemoni budaya patriarki yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan ternyata memengaruhi kehidupan mereka kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh Negara

terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistematis. Pada hakikatnya, Negara berkewajiban melindungi warganya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, namun faktanya kepentingan spesifik perempuan terabaikan, baik di DPR, pemerintah maupun lembaga-lembaga social lainnya. (Wahid,2014: 132-133)

Seharusnya Negara yang memiliki kekuatan hegemoni tidak menimbulkan ketertindasan melainkan menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, bukan sebaliknya, yaitu hegemoni Negara telah mengakibatkan dominasi terhadap perempuan dan kaum marginal lainnya yang secara mapan menciptakan persepsi dan realitas politik yang meragukan kaum perempuan, sehingga terkadang sulit sekali bagi kaum perempuan untuk keluar dari marginalisasi yang mereka alami. Marginalisasi inilah yang kemudian mengakibatkan diskriminasi dalam beragam sector kehidupan baik public maupun privat.

Dalam wilayah birokrasi, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni Negara sangat factual. Salah satu indicator yang dapat dilihat adalah minimnya keterwakilan perempuan di parlemen baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga-lembaga tinggi Negara. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses historis yang telah membudaya dalam bahasa Gramsci disebut *cultural hegemony*.

Gramsci (Simon,1999:17), menyatakan bahwa hegemoni suatu kelompok mendominasi kelompok lain dalam masyarakat secara fundamental, merupakan sebuah fasisme. Dominasi yang berlangsung berakibat pada



kekerasan yang dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat, sehingga yang muncul adalah ideologi dominan yang menguasai realitas kehidupan masyarakat. Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung sepanjang waktu, dalam beragam sector kehidupan baik public maupun domestic. Dominasi dalam kehidupan birokrasi seperti birokrasi yang dilakukan Negara dan partai politik adalah bentuk kekerasan Negara terhadap perempuan di birokrasi. Kekerasan sistematis tersebut memengaruhi beragam kebijakan yang menyangkut harkat hidup kaum perempuan, bahkan terjadi birokrasi tubuh perempuan *physical sphere* oleh Negara demi kepentingan memelihara *status quo*.

Dalam hal itu, *civil society* berpikir bagaimana kelompok dominan atau masyarakat Negara berpikir, yaitu berdasarkan nilai-nilai dominan mereka anggap sebagai cara pikir kelompok subordinat. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah didominasi dan menjalankan rencana dari hegemoni Negara dan kelompok dominan penguasa. Gramsci mengatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara *status quo* kelompok dominan atau penguasa serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan apa yang marxisme sebut sebagai kesadaran palsu *false consciousness*. Kaum perempuan di birokrasi lebih banyak dijadikan partisipatif pasif, penggembira dalam kampanye dan asset untuk meraih jumlah suara ketika pemilu berlangsung. Kondisi yang berlangsung. Kondisi yang berlangsung sepanjang sejarah pemilu Indonesia ini

diakibatkan oleh system budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki otonomi dan independen dalam birokrasi.

Perempuan, dalam konteks ini adalah kelompok subordinat merupakan bagian masyarakat sipil yang dalam tataran konseptual dan praktisnya sangat didominasi oleh pemikiran atau konsep kelompok dominan, yaitu laki-laki dan Negara. Konsep kehidupan mereka ditentukan dan dipahami oleh budaya kelompok penguasa dan Negara. Kelompok penguasa dan Negara didominasi oleh laki-laki yang diakibatkan dari konstruksi sistematis selama ini sehingga kehidupan birokrasi juga didominasi oleh kaum laki-laki yang selama ini secara budaya lebih memiliki keterbukaan dan diidentifikasi dengan wilayah dan peran public. Semua itu memengaruhi penguasa dan kaum laki-laki yang memiliki hegemoni dan ideology dominan dan memandang perempuan sebagai individu berdasarkan pemahaman budaya patriarki yang sangat mengutamakan laki-laki dan sekaligus memengaruhi diri dan lingkungan mereka.

Pandangan tersebut berakibat pada lemahnya keterlibatan partisipasi perempuan di ruang public seperti birokrasi. Birokrasi sebagai ruang public dinyatakan sebagai aktivitas yang tidak tepat bagi perempuan karena dianggap kotor, kasar, tabu, dan lain sebagainya.

## **7. Teori-teori**

### **a. Pendekatan teori Struktural Fungsional**

Teori structural fungsional menjelaskan bagaimana fungsinya suatu struktur, baik mikro maupun makro, jika tetap ada maka ia memiliki

fungsi. Ralp Dahendrof (1986-196) memberikan asumsi dasar terkait teori ini, yakni:

- 1). Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative mantap dan stabil.
- 2). Elemen-elemen struktur tersebut terintegrasi dengan baik
- 3). Setiap elemen memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai system

b. Pendekatan teori structural konflik

Teori structural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda pula, Ralp Dahendrof (1986:197-198) memberikan pula beberapa asumsi yang terkait teori ini:

- 1). Setiap masyarakat, dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan social terdapat dimana-mana
- 2). Setiap masyarakat dalam setiap hal memperlihatkan pertingkaian dan konflik social terdapat dimana-mana

## **B. Kerangka Konsep**

Patriarki adalah adalah sebuah system social yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak social, dan penguasaan

property. Beberapa masyarakat patriarki juga patrilineal, yang berarti bahwa property dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki.

System sosila patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, social, hokum, dll.

Perempuan kiprahnya selalu dipersoalkan dalam tatanan masyarakat yang masih memegang budaya patriarki. Perempuan sering kali dianggap sebagai pelengkap dalam berbagai aktivitas dan relasi social. Perempuan tidak pernah direstui tampil menjadi pemimpin dalam bidang kerja yang digeluti. Demokrasi yang memungkinkan adaptasi nilai-nilai kesetaraan gender di ruang public, penerapannya masih berjalan setengah-setengah dalam menyetarakan posisi perempuan dengan laki-laki. Perempuan tetap mengalami fase marginalisasi di ruang public.

Dalam lingkup birokrasi, perempuan masih dianggap sebagai kanca wingki dalam relasi kerja yang masih kentara menempatkan dominasi peran laki-laki. Wujudnya, acap kali karir perempuan buntu ketika menjelajahi jalan pucuk pimpinan birokrasi. Hanya sedikit perempuan yang mampu menapak menjadi kandidat pemimpin dilingkungan birokrasi pemerintah, apalagi menjadi pimpinannya.

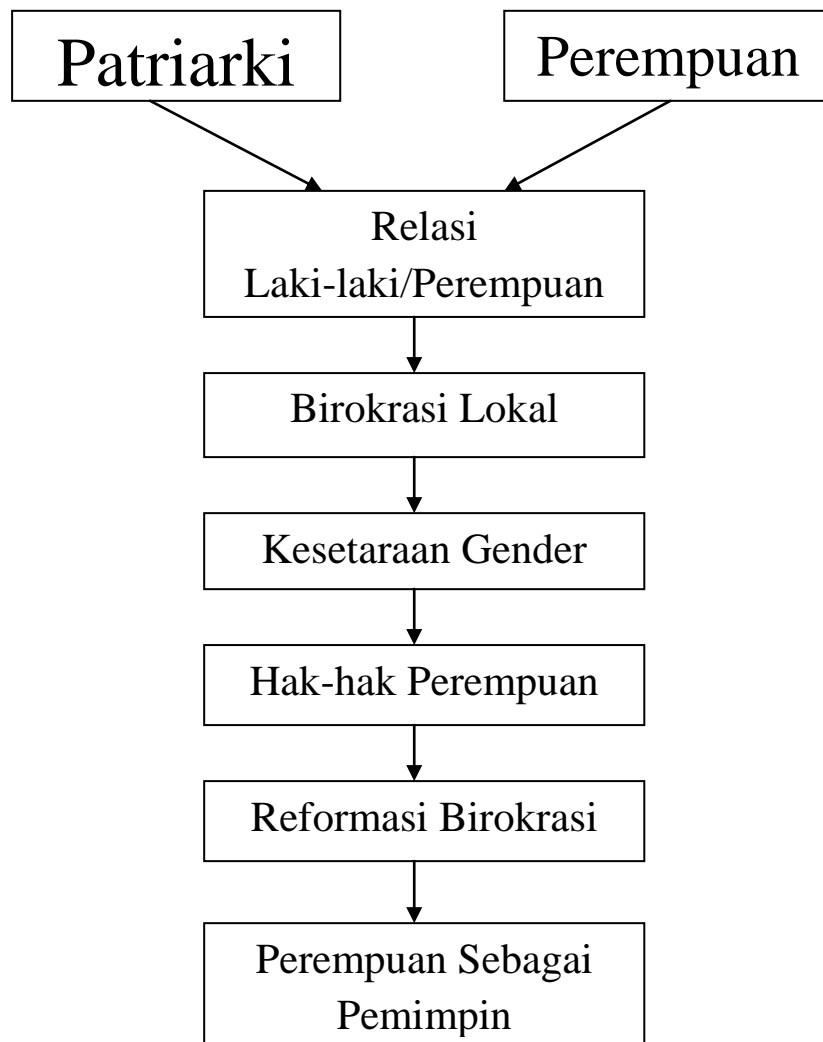
Birokrasi yang memiliki ikatan sejarah kolonialisasi mataram masih mengedepankan superioritas laki-laki. Masih kuat anggapan tidak adil gender di daerah bawah laki-laki adalah pemimpin. Memiliki kekuatan mengendalikan

berbagai sumber daya manusia, dan memiliki talenta kepemimpinan birokrasi yang jauh lebih unggul disbanding dengan perempuan.

Hal tersebut akan memandulkan potensi dan ekspresi talenta kepemimpinan perempuan. Sudah waktunya situasi tersebut diakhiri dengan perubahan kultur dan kebijakan structural yang pro keadilan gender.

Berbagai kemajuan yang dimiliki oleh perempuan sayangnya terlihat belum bisa menandingi laki-laki, terutama dalam hal kepemimpinan. Terkait proporsinya, peran perempuan sebagai pemimpin memang masih tertinggal jauh. Selama ini konsep kepemimpinan lebih banyak diidentik dengan laki-laki, maka dari itu laki-laki cenderung dianggap lebih unggul dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Namun bukan menjadi hal yang mustahil jika perempuan juga memainkan perannya sebagai pemimpin, karena ternyata dapat ditemukan perempuan-perempuan yang menduduki posisi sebagai pemimpin didalam sebuah organisasi.

**Bagan Kerangka Konsep**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (dalam Pambudi, 2014), metode kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan.

Menurut Somantri (dalam Mustofa, 2013), penelitian kualitatif sangat memperbaiki proses, peristiwa, dan otensitas. Nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas dan melibatkan subjek dengan jumlah yang relative sedikit. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan obyek penelitiannya. Peneliti memilih pendekatan studi kasus karena penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana fenomena yang sedang terjadi. Selain itu, peneliti tidak banyak ikut berpartisipasi demi menjaga keautentikan fenomena social yang ada.

Skripsi ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil berkenaan dengan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusi.

Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya secara ilmiah. Menurut Prof Dr. Sugiono, (2012:9) metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika sistematis, prinsip angka atau metode statistik pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mentah untuk analisis kualitatif. Seperti halnya yang disebutkan oleh Lexy J. Moleong (2001:1), menjelaskan mengenai penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi "proses" daripada "hasil".

Hal ini disebabkan oleh hubungan-hubungan bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Dengan penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.



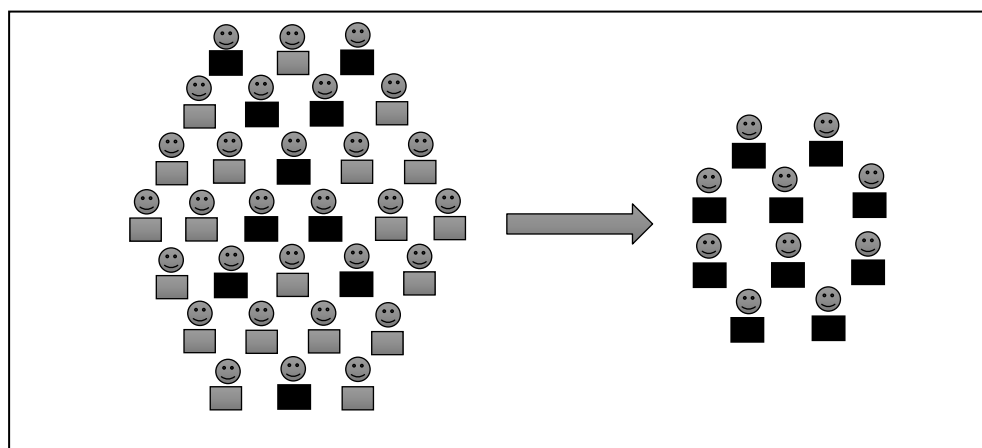
## B. Lokus Penelitian

Penelitian ini, secara geografis terletak di Kelurahan Antang Kota Makassar. Pada penelitian ini berkaitan dengan "Isu Patriarki pada Perempuan dalam Birokrasi Lokal". Subjek penelitian ini dikhususkan pada masyarakat khususnya perempuan di Kelurahan Antang.

## C. Informan Penelitian

Dalam pengambilan data digunakan teknik purposive sampling, dimana teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya adalah orang tersebut dianggap yang terkait apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti dan mengspesifikkan kriteria

berdasarkan apa yang ditetapkan oleh peneliti. Di bawah ini merupakan contoh gambar Purposive Sampling:



**Gambar 3.1 Purposive Sampling**

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi

persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- a. Informan Kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informan pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan Biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi social yang diteliti.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi yang sedang diteliti.

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya. Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak

didasarkan perhitungan stastitik.Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Daftar Informan:

**Tabel 3.1**

**Daftar Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>
1	Amanda Syahwaldi, S.STP.,MM	Lurah Antang
2	Jumiati., S.Sos	Sekretaris Lurah Antang
3	Hj. Salmiah Nahar	Masyarakat Antang
4	Seniwati.,SH	Masyarakat Antang
5	Aswanul Amri.,S.Ag	Masyarakat Antang
6	Ramsia.,S.Ag	Staf Kelurahan Antang
7	Indasari.,STP	Staf Kelurahan Antang
8	Nur Rahmi	Staf kelurahan Antang

#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada perempuan yang berada di kelurahan Antang, Kota Makassar dengan mengetahui bagaimana isu patriarki pada perempuan dalam birokrasi lokal.Berdasarkan kenyataan tersebut, maka lokasi ini dirasa relevan dengan tujuan penelitian.

#### **E. Instrument Penelitian**

Untuk memperoleh data penelitian ini, maka digunakanlah instrumen penelitian berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.

2. Panduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.
3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **F. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

##### **1. Data Primer**

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada obyek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

*Observation* (observasi) yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di kecamatan, yaitu pengumpulan data dengan melihat secara langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dimana peneliti telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam, yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung yang bersumber dari laporan-

laporan yang berkaitan dengan implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

#### 4. Partisipatif

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung di lapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Pengamatan ini mempunyai maksud bahwa pengumpulan data melibatkan interaksi social antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam suatu setting selama pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa menempatkan diri sebagai peneliti.

### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting data yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan, yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduciton*)

Reduksi data merupakan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik network (jejaring kerja), dan bagang.

## 3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi.

Tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data berakhir adalah penarikan kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

### **I. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompokanya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisanya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan ditambah waktu satu minggu lagi dan jika dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data. Bila setelah diteliti kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

## 2. Meningkatkan Ketekunan

Dengan perpanjangan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah/enteng data informasi.

## 3. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data) atau istilah lain dikenal dengan *trustworthiness*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan.

### a. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber



adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut.

b. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang samadengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

c. Trianggulasi Peneliti

Trianggulasi peneliti adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang peneliti dengan peneliti lainnya (peneliti yang berbeda) tidak lain untuk mengecek kembali tingkat kepercayaan data dengan begitu akan memberi kemungkinan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akan lebih dipercayai.

d. Trianggulasi Waktu

Trianggulasi waktu adalah pengujian data yang telah dikumpulkan dengan memprefikasi kembali data melalui informan yang sama pada waktu yang berbeda.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN HISTORIS DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kelurahan Antang**

Secara administratif, Antang adalah salah satu Kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dulunya masuk ke dalam wilayah Kecamatan Panakukkang sebelum dimekarkan menjadi satu Kecamatan sendiri. Letaknya di timur laut pusat kota Makassar. Antang berbatasan langsung dengan beberapa kelurahan lain seperti Tello baru, Borong, Bangkala, dan Tamangapa. Jarak dari pusat kota Makassar (dengan asumsi Karebosi adalah pusat) sekira 9 KM.

Topografi wilayah antang lebih banyak datar dengan beberapa bagian yang berada di ketinggian, mungkin tidak lebih dari 10 mdpl. Namun, ada juga beberapa wilayah antang yang lebih tinggi dari itu, berbukit-bukit dengan batu cadas yang mendominasi.

Wilayah Antang bertransformasi dari wilayah yang dulunya menyeramkan dan penuh dengan pepohonan menjadi wilayah yang ramai oleh perumahan. Di awal pembangunannya, imaji buruk tentang Antang masih sering terngiang bagaimana menyeramkannya wilayah antang dulu, lengkap dengan kemungkinan banjirnya di musim hujan.

Seiring berjalannya waktu, imaji tentang wilayah antang yang menyeramkan akhirnya lenyap juga. Sekarang, antang sudah tidak menyeramkan seperti dulu lagi. Antang berubah menjadi kawasan yang ramai, bukan hanya

orang perumahan tapi juga beragam geliat ekonomi. Ruko-ruko dan pusat perbelanjaan bermunculan, bersisian di tepi jalan besar yang membelah wilayah Antang.

Antang jaman sekarang adalah daerah yang justru akrab dengan macet, utamanya di jam pergi dan pulang kantor. Kuburan Cina yang dulunya tanah lapang disulap menjadi lapangan sepak bola sekarang sudah tertutupi oleh deretan ruko. Nyaris tidak bisa dikenali lagi kecuali didepan jalan masuknya ada plang besi dengan deretan huruf kanji berbahasa Mandarin.

Wilayah Antang terdapat sumur tua keramat yang diyakini oleh masyarakat sebagai sumur pertama di Kota Makassar yang biasa dijadikan tempat berdoa sepi kunjungan. Mungkin karena bukan musim caleg, tapi pemilihan kepala daerah jadi sepi pengunjung padahal saat ini mulai musim pilkada.

Sumur yang usianya sekitar 100 tahunan lebih itu tak pernah sepi pengunjung, apalagi disaat pemilihan legislatif berlangsung. Sudah banyak caleg yang datang setiap musim pancelagan disini. Yah mereka mayoritas tujuannya sama mencari berkah Allah melalui wadah air yang berasal dari sumur tua itu. Sumur tua dan keramat yang terletak didalam sebuah lorong di kecamatan Manggala, Kelurahan Antang, Kota Makassar itu kedalamannya tak lebih dari 1 meter. Namun kelebihanannya, sejak sumur itu ada airnya tak pernah kering meski musim kemarau panjang menimpa Sulsel, khususnya Kota Makassar.

Sumur itu awalnya hanya sebesar mulut ember. Masyarakat Makassar menamakan "Bungung Lompoa" ri Antang. Disebut "Lompoa" (besar) bukan diartikan karena diameter sumurnya yang sekarang sudah besar. Melainkan adanya

sejarah awal munculnya sumur tua dan keramat tersebut. Warga percaya ada campur tangan Tuhan melalui tangan salah seorang penziat agama islam asal aceh yang kala itu hendak menyiarkan agama islam di daerah antang, manggala, Makassar. Penziar agama islam itu sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat sulsel pada umumnya, ia digelar dengan sebutan Nene Lomo Ri Antang seorang wali atau kekasih Tuhan.

Sejarah munculnya sumur keramat tersebut sama persis dengan jalan cerita munculnya air zam-zam di tanah arab. Masyarakat antang kesulitan mendapatkan air dan tak tahu berbuat apalagi. Berbagai ritual adat telah digelar karena pada saat itu masyarakat masih menganut paham animism, namun harapan tak pernah tercapai untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari.

## **B. Gambaran Umum Kelurahan Antang**

Kelurahan Antang adalah salah satu kelurahan diantara delapan Kelurahan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Kelurahan Antang terbentuk pada tahun 1978 hasil pemekaran dari kampung pannara dan kampung bitowa. Ketika awal terbentuknya disebut dengan Pemerintah Antang.

Kepala Lurah Antang pertama adalah Bapak Ali Ahmad. Pada pemilihan kedua terpilihlah Bapak Syamsuddin H, BA menjadi Lurah Antang. Pada pemilihan ke tiga terpilihlah Bapak Muhidin.,SH menjadi lurah Antang. Pada pemilihan Ke empat terpilihlah Bapak Drs. Burhanuddin menjadi Lurah Antang. Pada pemilihan ke lima terpilihlah Bapak Andi Fadli.,S.STP,M.SI menjadi lurah

Antang. Pada pemilihan ke enam terpilihlah Bapak Amanda Syahwalidi.,S.STP,MM menjadi lurah antang sampai saat ini.

Kelurahan Antang merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. Sebagian besar wilayah Kelurahan Antang adalah bangunan-bangunan rumah penduduk dan ruko-ruko yang mengelilinginya, lahan-lahan perkebunan dan persawahan.

Kelurahan Antang terdapat fasilitas balai kelurahan seperti pada masyarakat umumnya. Balai kelurahan tersebut biasanya digunakan masyarakat Kelurahan Antang sebagai tempat forum atau tempat diskusi khususnya adalah para aparat pemerintahan setempat. Selain itu, kelurahan antang juga menyediakan fasilitas yaitu kantor pelayanan masyarakat, dimana kantor pelayanan masyarakat tersebut berfungsi untuk membantu masyarakat antang untuk mengurus surat-surat yang diinginkan dan masyarakat antang juga bisa mendapatkan informasi di kantor tersebut. Kelurahan antang juga menyediakan fasilitas kesehatan yaitu puskesmas tepatnya berada di samping kantor kelurahan antang.

Kelurahan Antang dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan Laki-laki, sekretaris kelurahan perempuan dan perangkat Kelurahan lainnya juga diperankan oleh laki-laki dan perempuan.

Kelurahan Antang mempunyai Organisasi Rukun Warga (ORW) sebanyak 6 ORW yang semua dipimpin oleh laki-laki. Pada setiap ORW dibagi lagi kedalam beberapa wilayah yang dikenal sebagai Organisasi Rukun Tetangga (ORT) , sehingga terdapat 40 ORT, di wilayah kelurahan antang. Daerah Pannara (RW 1)

terbagi dalam 9 RT. Pattunuang (RW 2) terbagi dalam 11 RT. Ujung Bori (RW 3) terbagi dalam 3 RT. Bitowa (RT 4) terbagi menjadi 8 RT. Antang Pasar (RW5) terbagi dalam 5 RT. Lasuloro (RW 6) terbagi dalam 4 RT.

### C. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan Antang

Kelurahan Antang adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan manggala Kota Makassar. Secara geografis, Kelurahan Antang berbatasan dengan daerah lain, yaitu:

**Tabel.4.2**  
**Letak Batas Kelurahan Antang**

<b>Letak Batas</b>	<b>Kelurahan</b>
Sebelah Utara	Tello Baru
Sebelah Selatan	Bangkala
Sebelah Barat	Borong
Sebelah Timur	Manggala

*Sumber Data Sekunder: Kantor Kelurahan Antang, 2018*

Kelurahan Antang memiliki luas wilayah 3,72 Ha dan populasi sebanyak 10,971 jiwa yang terbagi atas 5,466 perempuan dan 5,505 laki-laki serta 4,401 kartu keluarga yang terdaftar pada Kelurahan Antang. Kelurahan Antang terdiri dari 6 RW dan 40 RT.

**Tabel 4.3.**  
**Daftar RW Kelurahan Antang**

<b>RW</b>	<b>Luas H2</b>
1	130,07
2	107,34
3	3,79
4	67,14
5	23,51
6	198,11

*Sumber Data Sekunder: Kantor Kelurahan Antang 2018*



**Gambar.4.2. Peta Lokasi Kelurahan Antang**

#### **D. Kependudukan**

Menurut data yang diperoleh dari laporan kependudukan kantor (monografi) Kelurahan Antang pada bulan Agustus 2018

**Tabel.4.4.**

**Daftar Kependudukan Kelurahan Antang**

No	Perincian	Warga Neg. RI		Warga Asing		Jumlah		
		Laki2	Per	Laki2	Per	Laki2	Per	Laki2+Per
1	Pen.awal bln ini	5348	5315	0	0	5348	5315	10.663
2	Kelahiran bln ini	0	0	0	0	0	0	0
3	Kematian bln ini	2	0	0	0	0	0	0
4	Pendatang bln ini	16	10	0	0	16	10	26
5	Pindah bln ini	25	11	0	0	25	11	36
6	Pnduduk akhir bln	5.337	5.314	0	0	5.337	5.314	10.651

*Sumber Data Sekunder: Kantor Kelurahan Antang 2018*

Jumlah total penduduk Kelurahan Antang Kecamatan Manggala adalah 10.651 jiwa, yang terdiri dari 1.963 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki adalah 5.337 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 5.314 jiwa. Data dari

monografi tersebut tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk di Kelurahan Antang, bila dilihat menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk mengetahui besarnya jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Serta untuk mengetahui jumlah Kepala keluarga (KK) dalam suatu rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui jumlah penduduk di Kelurahan Antang dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.5**

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Laki-laki	5.337	50,3
Perempuan	5.314	49,7
<b>Total</b>	10.651	<b>100</b>

*Sumber Data Sekunder: Kantor Kelurahan Antang, 2018*

Berdasarkan table diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk, antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan ada perbedaan walaupun tidak terlalu jauh. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yaitu sebesar 5.337 jiwa (50,3%) sedangkan jumlah penduduk perempuan yaitu 5.314 jiwa (49,7%) dari jumlah keseluruhan penduduk kelurahan antang.

### **E. Keadaan Demografis**

Keadaan demografis merupakan salah satu faktor sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi yang mempengaruhi stratifikasi dalam masyarakat, faktor penduduk ini menempati posisi yang paling utama, karena seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan itu adalah suatu



upaya manusia untuk merubah pola hidup dan status social mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar pembangunan daerah dan sumber daya alam. Jumlah penduduk keseluruhan di kelurahan Antang berjumlah 10.651 jiwa dengan jumlah sebesar 1.963 Kepala Keluarga. Pada umumnya terdiri dari suku Makassar, yang seluruhnya memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

#### **F. Keadaan Penduduk Menurut Agama**

Pada dasarnya masyarakat mempunyai kebutuhan–kebutuhan tertentu untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut bukan hanya bersifat jasmani tetapi juga kebutuhan rohani. Dengan memeluk suatu agama terjadi pula ikatan batiniah antara hamba dan penciptanya. Agama yang merupakan pedoman hidup yang memberikan ketengangan dan kedamaian diantara pemeluknya.

Agama juga merupakan pedoman hidup yang sangat dipatuhi oleh masyarakat dalam membina hubungan diantara mereka, beberapa aturan yang mengikat bersumber dari agama yang dianut. Kebutuhan rohani seseorang sangat memerlukan ketentraman suatu masyarakat, keseluruhan dari semua penduduk di Kelurahan Antang yang sebanyak 10.651 jiwa menganut berbagai macam agama yang diakui di Indonesia.

## **G. Keadaan Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang proses kegiatan-kegiatan social maupun kegiatan ekonomi, maka sarana dan prasarana sangat penting keberadaannya. Hal tersebut selain menunjang untuk kegiatan-kegiatan social ekonomi tertentu, dapat pula mempengaruhi proses sarana pendistribusian hasil-hasil usaha mereka yang dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan ekonomi jasa.

Makin lengkap sarana suatu kelurahan maka dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan individu didalam suatu masyarakat. Beberapa sarana yang menunjang proses kegiatan social ekonomi di Kelurahan Antang.

### **a. Sarana Jalan dan Transportasi**

Dalam proses pemasaran terutama hasil perindustrian pertanian maupun peternakan, jalan transportasi sangat penting keberadaannya. Sarana transportasi dan jalan di Kelurahan Antang yang dapat menghubungkan daerah pelosok yang termasuk sebagai kantong-kantong produksi hasil-hasil pertanian, maka jauhnya letak tempat kerja penduduk dan tempat tinggal, alat transportasi yang digunakan di kelurahan Antang ini ada mobil, Motor, Angkutan Umum, Bentor dan Becak.

### **b. Sarana Pendidikan**

Tingkat pendidikan penduduk dalam suatu wilayah juga besar dipengaruhi oleh sarana dan prasarana penunjang untuk penduduknya dalam wilayah tersebut. Untuk itu keberadaan sekolah dengan tenaga pengajar yang memadai diperlukan untuk perbaikan taraf hidup yang akhirnya membawa peningkatan kualitas yang lebih baik. Jumlah keseluruhan dari sarana

pendidikan yang di miliki Kelurahan Antang adalah 21 gedung yang terdiri dari:

**Tabel 4.6.**

**Jumlah Sarana Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Gedung</b>	<b>Persentase (%)</b>
Taman Kanak-kanak (TK)	5	16,5%
Sekolah Dasar (SD)	8	41%
SLTP	2	13%
SMA	4	16,5%
Perguruan Tinggi	2	13%
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber Data Sekunder: Kantor Kelurahan Antang 2018*

Berdasarkan dari table diatas, jumlah keseluruhan dari sarana pendidikan yang dimiliki adalah 21 gedung yang terdiri dari Taman Kanak-kanak 5 gedung (16,5%), Sekolah Dasar 8 gedung (41%), SLTP 2 gedung (13%), SMA 4 gedung (16,5%), dan Perguruan Tinggi 2 gedung (13%).

c. Prasarana Kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu masyarakat dapat dilihat dari sedut kesehatan, semakin maju sarana penunjang kesehatan semakin maju pula tingkat kesehatan masyarakatnya.

**H. Budaya Kota Makassar**

Dalam system kehidupan masyarakat budaya Kota Makassar di Sulawesi Selatan, Siri' adalah salah satu bentuk pranata susila social yang dianggap cukup

tabu oleh masyarakat di daerah ini. Begitu tabunya masalah Siri' ini dalam system kehidupan ke masyarakatan semesta termasuk diantaranya adalah siri' sebagai upaya privensi terjadinya delik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, bahkan sampai kepada bernegara sekalipun.

Dalam penerapan nilai-nilai budaya Siri' kedalam sistem kehidupan sehari-hari, bagi suku Makassar bukanlah sekedar symbol. Tetapi lebih dari itu sangat penting artinya terutama sekali dalam kehidupan kemasyarakatan, tata pemerintah, dan bahkan tata hokum sebagai hokum tak tertulis. Orang yang tidak memiliki nilai Siri' dalam dirinya, maka orang tersebut dianggap tidak beradab dan tidak berharakat-martabat.

## **BAB V**

### **ISU PATRIARKI PADA PEREMPUAN DALAM BIROKRASI**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pada BAB ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dengan berdasar pada hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan di Kelurahan Antang, Kota Makassar sejak bulan Agustus 2018 sampai September 2018. Dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan pada bagian metode penelitian yang mencakup kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta proses penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Adapun proses penulis menempuh penelitian ini bermula dari pengurusan surat izin penelitian di LP3M Unismuh Makassar. Setelah surat izin penelitian dikeluarkan selanjutnya surat tersebut dibawa ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, untuk menyetujui surat izin penelitian. Setelah itu surat tersebut dibawa lagi ke Kantor Balai Kota Makassar untuk mendapatkan surat izin penelitian ke Kecamatan Manggala. Setelah surat tersebut selesai, surat dari Kecamatan Manggala dibawa lagi ke Kelurahan Antang untuk melaksanakan penelitian.

Sebagian besar masyarakat Indonesia dikenal sebagai penganut budaya patriarki. Anggapan ini terkadang berdasar pada generalisasi budaya Jawa yang menjadi tolak ukur kebudayaan Indonesia. Hal tersebut wajar adanya mengingat suku Jawa adalah kalangan mayoritas dalam kendali pemerintahan dan tokoh

masyarakat, termasuk masyarakat di kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Dunia birokrasi yang menjadi agenda utama dalam wacana masyarakat telah memberikan warna tersendiri terhadap tatanan pemerintahan di Negara kita khususnya di Kelurahan Antang Kota Makassar. Hal ini menjadi daya tarik bagi sekelompok orang termasuk kaum perempuan yang ingin berkiprah didalam birokrasi. Perempuan sebagai kaum yang di presentasikan sebagai seorang ibu dan istri telah dapat membuktikan kemampuannya dalam kegiatan birokrasi.

Mengenai perempuan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara telah disampaikan oleh Bung Karno "Perempuan Indonesia, kewajiban telah terang sekarang ikutlah serta dalam usaha menyelamatkan republic, dan jika Republik sudah selamat ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun Negara nasional, janganlah tertinggal dalam revolusi Negara dari awal hingga akhir, dan janganlah pula tertinggal dalam usaha menyusun masyarakat berkeadilan social dan kesejahteraan social. Didalam masyarakat berkeadilan social dan kesejahteraan social itulah engkau akan menjadi perempuan bahagia, perempuan merdeka."

Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka tuntunan peran yang harus dijalankan oleh perempuan mengalami perubahan pula. Dahulu masyarakat sulit untuk mengaktualisasikan dirinya karena adanya ikatan budaya, maka budaya itupun akan berubah sejalan dengan terjadinya perubahan social pada masyarakat.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018,

SN mengatakan kepada peneliti:

"Bahwa perempuan itu bisa juga jadi pemimpin bukan hanya laki-laki karena kita lihat dari segi wawasan dia juga bisa berpikir lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan sangat hebat di mataku karena biasa itu apa yang dilaksanakan laki-laki bisa juga dilaksanakan perempuan. Saya sudah melihat cara kepemimpinan perempuan, yang saya dapat lihat dari kepemimpinan perempuan bahwasanya sama dengan kepemimpinan laki-laki, ada juga yang bagus ada juga yang tidak jadi tergantung itu yang bersangkutan juga kepeimpinannya kadang juga lebih bagus kepemimpinannya seorang perempuan daripada laki-laki. Jika perempuan terjun menjadi pemimpin di dunia birokrasi saya sih setuju-setuju saja tergantung dengan kemampuan seseorang kalau dia mampu kenapa tidak".

Informan diatas menjelaskan bahwa pada zaman ini seorang perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin bukan hanya seorang laki-laki yang harus menjadi pemimpin. Saat ini untuk menjadi seorang pemimpin sangat dibutuhkan yang namanya wawasan atau pengalaman, dan seorang perempuan juga memiliki wawasan atau pengalaman yang banyak bukan hanya seorang laki-laki yang memilikinya. Perempuan saat ini sangatlah hebat karena perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, sedangkan laki-laki tidak bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Jika dilihat dari cara kepemimpinan seorang perempuan dan laki-laki, bahkan seorang perempuan lebih hebat cara kepemimpinannya dibandingkan cara kepemimpinan laki-laki.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018,

SW mengatakan kepada peneliti:

"perempuan bagi saya itu sosok manusia yang benar-benar istimewa kalau kita memang juga bisa menempatkan diri kita sebagai seorang perempuan. Emansipasi wanita memang perlu juga sebenarnya tapi dikondisikan itu emansipasi wanita kalau memang dalam hal ini pada saat kondisi memang

kita membutuhkan sosok seorang perempuan apa salahnya emansipasi itu ada. Perempuan itu hebat karena dia bisa menjadi tiga. Tiga dalam artian perempuan sebagai perempuan sebagai seorang pribadinya perempuan, pada saat dia menjadi seorang istri itulah sosok perempuan, dan pada saat dia menjadi sosok ibu, itulah sosok perempuan bagi saya. Antusias saya juga tidak terlalu mengatakan bahwasanya perempuan itu harus terjun dalam bidang politik tidak menyarankan atau bagaimana, tapi tidak ada salahnya juga seorang perempuan itu tau dunia politik karena kita memang ada dirana yang berhubungan dengan politik jadi tidak ada salahnya perempuan juga tau apa sih itu politik. Kepemimpinan seorang perempuan seperti slogan yang mengatakan runtuhnya suatu Negara kalau perempuan itu kapasitasnya kurang bagus berarti sangat besar artinya seorang perempuan di mata Negara, karena coba slogan mengatakan runtuhnya suatu Negara kalau perempuannya tidak bagus jadi, makna dari itu bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perempuan memegang peranan yang sangat penting. Kalau soal setuju atau tidak seorang perempuan menjadi seorang perempuan bagi saya pribadi dikondisikan kalau memang saat itu sudah tidak ada yang bisa apa salahnya seorang perempuan menjadi pemimpin kalau dia juga memang memberikan kapasitas yang bisa di acukan jempol baik dari segi legalitasnya, sumber dayanya, dan memang itu bisa menopang untuk seorang pemimpin apa salahnya."

Informan diatas menjelaskan bahwa perempuan adalah sosok manusia yang sangat istimewa. Perempuan juga itu hebat karena perempuan bisa memposisikan dirinya contohnya perempuan bisa menjadi perempuan, perempuan juga bisa menjadi pribadi perempuan, dan perempuan juga bisa menjadi sosok istri bagi suaminya dan sosok ibu bagi anak-anaknya, bahkan perempuan juga bisa menjadi sosok ayah bagi anak-anaknya. Mengenai masalah kepemimpinan perempuan beliau tidak menakankan bahwasanya perempuan harus terjun kedalam dunia politik tapi tidak ada salahnya juga seorang perempuan menjadi pemimpin di dunia politik. Di zaman sekarang dimana seorang perempuan bisa juga menjadi seorang pemimpin di dunia politik bukan hanya laki-laki.



Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018,

AS bapak Lurah Antang mengatakan kepada peneliti:

"yang namanya pejabat itu dek kalau kita mau berfikir siapapun itu. Yang pertama itu kita harus bersedia ditempatkan dimana saja toh, itu pernyataan yang paling mendasari seluruh wilayah Indonesia jadi ketika perempuan yang ditugaskan untuk memimpin suatu wilayah saya rasa tidak ada masalah, karena selama sesuai dengan kemampuannya kemudian pengalamannya pernah bertugas dimana jangan orang yang bertugas di dinas pariwisata dilempar jadi lurah pusingi itu. Kecuali dia pernah menjadi sekretaris lurah, staf di kecamatan, begitu jadi lurah tidak kaget. Kalau dari dinas kerja di kelurahan bingungi. Caleg-caleg perempuan yang saat ini bermunculan itu sudah aturannya jadi perempuan itu sudah 30% jadi anggota dewan. Di daerah panakukkang ini jumlah caleg-caleg perempuan lebih dari 30% oleh karena itu, saya menganggap perempuan yang berada di Kecamatan Manggala khususnya Kelurahan Antang banyak perempuan yang maju, artinya mereka sudah berani berkompetisi mereka yakin maju dan siap menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, para perempuan ini saya support mereka, karena dengan adanya caleg perempuan bisa mewakili kaum perempuan di kelurahan antang khususnya.

Informan diatas menjelaskan bahwa menjadi pejabat tidak mesti seorang laki-laki perempuan pun juga bisa menjadi pejabat, tetapi kita harus siap di tempatkan dimanapun itu. Jadi, ketika seorang perempuan menjadi seorang pemimpin dan bisa di tempatkan dimana saja saya rasa boleh-boleh saja, asalkan mereka punya kemampuan dan wawasan yang tinggi. Bahkan saat ini di Kecamatan Manggala khususnya di Kelurahan Antang sudah banyak perempuan yang mencalonkan untuk menjadi pemimpin di legislatif, bahkan sudah duduk di kursi legislatif. Kendati demikian belum ada perempuan yang menjadi Lurah Antang sampai saat ini, para perempuan-perempuan di Kelurahan Antang sudah membuktikan kemampuannya sebagai wakil rakyat.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018, J sekretaris lurah mengatakan kepada peneliti:

"selama ini Kelurahan Antang belum pernah ada pejabat perempuan, karena mungkin perempuan tidak ditempatkan disini. Tetapi kebanyakan dikelurahan lain sudah ada perempuan yang menjabat sebagai lurah. bahkan Sekarang ini perempuan itu sangat dibutuhkan suaranya, makanya perempuan sekarang dan kedepan lebih baik. Dalam pengambilan keputusan dalam birokrasi perempuan itu harus membutuhkan pengalaman dan pendidikan yang dimiliki sesuai dengan proporsinya. Dampak positif jika perempuan yg memimpin di kelurahan antang itu bisa melemahkan masyarakat karena watak dari masyarakat antang itu keras-keras dan perempuan juga bisa mengambil kebijakan. Perempuan saat ini sudah memiliki kepercayaan untuk tampil dalam dunia birokrasi."

Informan diatas menjelaskan bahwa pada masa periode pertama sampai periode saat ini belum ada perempuan yang menjadi lurah di Kelurahan Antang, tetapi di kelurahan-kelurahan yang lain sudah ada perempuan yang menjadi lurah. Untuk menjadi seorang lurah pun dibutuhkan pengalaman, wawasan, dan memiliki pendidikan yang tinggi, serta memiliki ilmu yang banyak mengenai kemasyarakatan. Karena watak masyarakat antang keras-keras maka dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat melembutkannya. Sekarang ini perempuan-perempuan yang ada di Kelurahan Antang sudah mempunyai kepercayaan diri untuk tampil dalam dunia birokrasi.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018, AA mengatakan kepada peneliti:

"perempuan boleh-boleh saja menjadi seorang pemimpin tidak ada batasan-batasan tertentu dimana kepemimpinan perempuan itu dibolehkan, misalnya ketika perempuan sudah berumah tangga. Yang namanya pemimpin tentu tidak boleh perempuan mengambil alih kepemimpinan itu menurut agama yang dimana laki-laki itu harus menjadi pemimpin, perempuan tidak boleh itu hanya laki-laki. Tapi diluar daripada itu dari segi pekerjaan, misalnya dari segi kepemimpinan baik itu disuatu wilayah atau dia ingin menjadi pejabat di suatu instansi, misalnya di kepala lapas kepala rumah sakit kepala daerah itu dibolehkan saja, tetapi kami dari kaum laki-laki menganggap bahwa kalau perempuan itu lebih berpotensi dari segi intelektualnya kenapa tidak. Tetapi selagi masih ada laki-laki yang memiliki potensi jauh lebih tinggi disbanding perempuan itu perempuan saya batasi dalam hal ini kecuali ada laki-laki yang lebih berpotensi disbanding perempuan ini. Tetapi tidak menghalangi perempuan ini untuk menjadi pemimpin, tidak ada halangan untuk perempuan menjadi seorang pemimpin. Kalau ditinjau dari segi agama perempuan itu memiliki kekuatan disbanding laki-laki kanapa? Karena perempuan mampu mengerjakan pekerjaan laki-laki tetapi laki-laki belum tentu mampu mengerjakan pekerjaan perempuan. Perempuan tidak hanya bekerja di dapur, tempat tidur, dan sumur karena satu sisi perempuan juga harus memiliki intelektual. Kalau perempuan hanya mengandalkan kecantikannya saja maka disisi lain boleh jadi terjadi di rumah tangga mereka. Artinya perempuan ini bisa dikucilkan oleh suaminya. Tetapi ketika perempuan memiliki intelektual yang tajam laki-laki pun tidak bisa berbuat seenaknya. Melihat minat perempuan saat ini itu sangat antusias, karena perempuan saat ini sudah banyak yang berpikiran ingin juga merasakan dunia pekerjaan tidal lagi menerima doktrin-doktrin orang tua yang dulu.

Informan diatas menjelaskan bahwa seorang perempuan boleh saja menjadi seorang pemimpin tidak ada batasan-batasan tertentu, tapi dalam agama menjelaskan bahwa seorang pemimpin adalah laki-laki dan yang dipimpin adalah perempuan, laki-laki sudah ditetapkan sebagai pemimpin wanita. Tapi pada zaman ini pekerjaan digeluti oleh semua orang bukan hanya laki-laki yang bekerja tetapi perempuan juga ikut bekerja. Masalah pekerjaan dari segi kepemimpinan baik itu disuatu wilayah ataupun disuatu

daerah perempuan juga ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut, bahkan sekarang sudah ada pemimpin seorang perempuan. Kepemimpinan seorang perempuan di dunia pekerjaan juga dilihat atas pengalaman dan wawasan yang dimilikinya terutama dari segi intelektualnya. Jika seorang perempuan memiliki intelektual yang sangat tinggi kenapa tidak untuk menjadi sosok pemimpin di dunia birokrasi. Tetapi perempuan juga harus bisa memposisikan dirinya dimana ia harus menjadi pemimpin dan dimana ia harus menjadi sosok yang dipimpin oleh laki-laki (suami).

## **B. Penjabaran Hasil Penelitian**

Dengan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan birokrasi, terutama dalam posisi–posisi pengambilan keputusan. Kontruksi social budaya yang menempatkan perempuan yang memberi dogma dalam pemikiran masyarakat hanya boleh mengurus persoalan domestic saja, dan tidak ada hak untuk merambah area birokrasi yang lain.

Di Negara Indonesia, dapat kita lihat mengenai kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, jika kita menguak sejarah menjelaskan bahwa laki-laki diperbolehkan meneruskan pendidikan, sedangkan perempuan tidak boleh karena ujung-ujungnya akan terjun ke Dapur, Sumur, dan Kasur, sehingga perempuan kurang mendapatkan pendidikan. Lalu muncullah gerakan emansipasi perempuan yang digagas oleh Raden Ajeng Kartini, dalam hal ini

sebenarnya menuntut hak perempuan dalam dunia pendidikan, bagaimana perempuan dapat menjadi role model dalam sosialisasi primer di keluarga jikalau perempuan tidak mampu memberikan pemahaman mengenai pembelajaran pendidikan, sehingga penting bagi perempuan dalam menempuh pendidikan.

Dalam gambaran sejarah, bahwa perempuan termasuk kaum yang termaginalkan namun paradigma terus terhegemoni hingga sekarang, sehingga perempuan selalu dianggap kaum lemah, namun inilah faktanya bahwa seberapa kuat gerakan feminisme di Indonesia namun budaya patriarki yang sudah dipegang erat oleh masyarakat Indonesia susah untuk dihilangkan.

Perempuan saat ini sudah dapat menempuh pendidikan dengan bebas. Tidak ada lagi larangan bagi perempuan untuk tidak menempuh yang namanya pendidikan. Dengan menempuh yang namanya pendidikan para perempuan bisa mendapatkan ilmu bukan hanya ilmu yang ia dapatkan tetapi pengalaman dan wawasan mereka bisa dapatkan. Dengan memperoleh pengalaman dan wawasan seorang perempuan bisa mengaktualisasikan ilmu yang diperolehnya, seperti seorang perempuan bisa menjadi pemimpin dalam suatu birokrasi.

Untuk menjadi seorang pemimpin di dunia birokrasi, baik itu laki-laki maupun perempuan harus seseorang mempunyai intelektual yang tinggi. Maksudnya di sini dengan mempunyai intelektual yang tinggi seseorang bisa memimpin suatu birokrasi dengan baik. Jika perempuan memiliki potensi dari segi intelektual kenapa tidak seorang perempuan menjadi pemimpin, selagi ia merasa mampu dan bisa memimpin suatu wilayah.

Jika perempuan sudah menjadi seorang pemimpin, seorang perempuan tersebut tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang istri jika ia sudah berumah tangga. Didalam rumah seorang perempuan harus dapat membagi perannya. Seorang perempuan tetap dipimpin oleh seorang laki-laki (suami) dan menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Jika ia sudah keluar dari rumahnya ia kembali menjadi seorang pemimpin dalam suatu wilayah tersebut.

### C. Interpretasi Hasil Penelitian

Penggambaran hasil dengan pemaknaan yang diberikan hasil wawancara serta teori-teori yang relevan itu teori Struktural Fungsional dan teori Struktural Konflik. Dalam berbagai pandangan umumnya manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda. Berbagai hasil penelitian yang diberikan peneliti memberikan hasil penelitian dengan interpretasi atau pemaknaan yang berbeda pula dan memberikan benturan hasil wawancara beserta teori yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan berikut ini hasil dari interpretasi penelitian yaitu:

No	Informan	Hasil Wawancara	Interpretasi	Teori
1	SN	perempuan saat ini bisa jadi pemimpin. Seorang pemimpin bukan hanya laki-laki tetapi perempuan juga bisa jadi pemimpin. Menurut saya perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Jika perempuan terjuan kedunia birokrasi saya sangat setuju	Seorang perempuan saat ini sudah harus menjadi pemimpin bukan hanya laki-laki.	Struktural Fungsional, Ralp Dahendrof (1986:196)

		tergantung dengan kemampuan yang dimilikinya.		
2	SW	Perempuan itu sangat istimewa. Jika perempuan terjun ke dunia birokrasi tidak ada salahnya karena kita memang berada di rana yang berhubungan jadi tidak ada salahnya perempuan juga berhak tau dunia politik. Perempuan menjadi pemimpin kalau dia juga memang memberikan kapasitas yang bisa diacukan jempol baik dari segi legalitasnya, sumber dayanya dan memang itu bisa menopang untuk seorang pemimpin.	Jika perempuan terjun dalam dunia birokrasi tidak ada salahnya itu sah-sah saja. Tetapi perempuan itu harus mempunyai kemampuan terhadap dunia politik.	Struktural Fungsional. Ralp Dahendorf, (1986:196)
3	AS	Perempuan yang ditugaskan untuk memimpin suatu wilayah saya rasa tidak ada masalahnya, karena selama sesuai dengan kemampuannya kemudian pengalamannya pernah bertugas dimana saja. Persentasi perempuan yang memasuki rana politik sudah mempunyai jata 30% oleh karena itu, saya menganggap perempuan yang berada di kecamatan manggala khususnya di kelurahan antang banyak perempuan yang maju	Perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan skill. Dan saat ini perempuan memiliki jata 30% di dunia politik.	Struktural Konflik. Ralp Dahendorf (1986:197-198)

		artinya mereka sudah yakin maju dan siap menjadi wakil rakyat.		
4	J	Sampai saat ini kelurahan antang belum pernah ada perempuan yang menjabat karena mungkin perempuan tidak ditempatkan disini. Tetapi kebanyakan di kelurahan antang sudah ada perempuan yang menjabat sebagai lurah. Sekarang ini perempuan ini sangat dibutuhkan suaranya, makanya perempuan sekarang dan kedepannya akan lebih baik. Perempuan saat ini sudah memiliki kepercayaan untuk tampil dalam dunia birokrasi.	Saat ini perempuan sangat dibutuhkan suaranya dalam dunia birokrasi, dan perempuan juga sudah memiliki kepercayaan yang tinggi untuk terjun ke dunia birokrasi.	Struktural Fungsional. Ralp Dahendrof (1986:196)
5	AA	Perempuan boleh-boleh saja menjadi seorang pemimpin tidak ada batasan-batasan tertentu dimana kepemimpinan perempuan itu dibolehkan. Misalnya ketika perempuan sudah berumah tangga yang namanya pemimpin tentu tidak boleh perempuan mengambil alih kepemimpinan seorang suami. Tapi diluar dari segi pekerjaan misalnya dari segi kepemimpinan baik itu disuatu wilayah atau dia ingin menjadi	Tidak ada salahnya perempuan untuk menjadi pemimpin disuatu instansi atau dunia birokrasi. Tetapi pada saat perempuan berada didalam rumah dia tdk boleh mengambil alih	Struktural Konflik. Ralp Dahendrof (1986:197-198)



		pejabat disuatu instansi. Tetapi selagi masih ada laki-laki yang memiliki potensi jauh lebih tinggi disbanding perempuan itu perempuan saya batasi dalam hal ini kecuali ada laki-laki yang lebih berpotensi disbanding perempuan. Tetapi tidak menghalangi perempuan ini untuk menjadi pemimpin tidak ada halangan untuk perempuan menjadi seorang pemimpin.	peranan laki-laki yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga tersebut.	
--	--	---	--	--

Dari hasil interpretasi diatas bahwa budaya patriarki saat ini masih melekat pada diri perempuan, meskipun tidak seperti dulu. Sebagian perempuan saat ini pikirannya sudah terbuka tentang kepemimpinan seorang perempuan bukan hanya seorang laki-laki yang bisa menjadi pemimpin. Seorang perempuan yang ingin terjun ke dunia politik apalagi menjadi pemimpin tidak boleh melupakan ataupun meninggalkan kodratnya sebagai perempuan jika ia berada didalam rumah.

## **BAB VI**

### **EKSISTENSI PEREMPUAN PADA RUANG PUBLIK**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berbagai persepsi pun bermunculan terkait kualifikasi maupun keberadaan perempuan dalam dunia birokrasi di negeri ini, dan menjadi perbincangan yang tiada habisnya dikalangan mahasiswa, pejabat, sampai masyarakat awam. Penilaian dalam keproporsionalan seseorang perempuan untuk duduk di kursi birokrasi tentu menjadi nilai penting masyarakat menilai, sehingga ketentuan dalam birokrasi sudah memberikan tipe dan kualifikasi perempuan seperti apa yang layak untuk menduduki jabatan strategis sebagai pemerintah daerah.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018, NR mengatakan kepada peneliti:

"kriteria perempuan yang layak duduk di kursi birokrasi adalah pertama, dia mempunyai pengetahuan, pendidikannya dia harus berpendidikan dalam arti dia mempunyai pengalaman eksekutif, setelah menempuh pendidikan dan menjadi guru misalnya, tapi kalau jadi ibu rumah tangga saja tidak gampangnanti kita harus tau kondisi di lapangan seperti apa, dalam eksekutif seperti apa. Harus pandai-pandai dan pengalaman eksekutif dalam karir. Mungkin begini, ohh kelihatannya gampang, sekarang money politik bisa saja yang kaya merasa seperti itu padahal ia harus memberi kontribusi pemikiran, ini menjadi poin ke dua. Birokrasi itu bukan hanya kerja otot tapi kerja pemikiran untuk mengetahui kontribusi pemikiran minimal ia harus mempunyai pengalaman kerja (Skill) selanjutnya jika dia anggota birokrasi harus cinta tanah air. Jika tidak maka dia tidak memperjuangkan kepentingan rakyat yang ada disini. Nah kalau perempuan yang belum mempunyai status sebagai seorang istri dia hanya perlu izin dari keluarganya, beda lagi dengan perempuan single parent atau yang mempunyai status sebagai istri atau ibu dia harus bersinergi dengan suaminya, suami harus ikhlas terjun ke bidang birokrasi, ikhlas dalam artian harus memahami kerja birokrasi seperti apa. Apalagi bagi seorang

perempuan yang mempunyai anak, menurut saya jangan sampai anak menjadi korban, karena itu adalah asset masa depan negri ini jangan sampai anak tersebut terbengkalai dalam pendidikan psikologisnya. Jadi pikirkan betul-betul, harus ada kesiapan matang."

Informan diatas menyatakan bahwa kriteria perempuan birokrasi yaitu harus memiliki pendidikan tinggi, pengalaman kerja atau skill. Pengalaman kerja bukan hanya di eksekutif saja tapi kerja-kerja nyata sehingga seorang perempuan mampu menyeimbangkan antara aksi kerja dan ilmu pengetahuannya. Kerja nyata yang selama ini yang ia bangun itu terbukti karena pengalaman kerja sebelum masuk di birokrasi kelurahan itu sudah matang dan mapan, kolaborasi unsure ilmu pengetahuan dan pengalaman sangat kompleks dalam memperjuangkan masyarakat antang.

Karena hadirnya perempuan dalam dunia birokrasi juga bukan untuk mendikte laki-laki atau anti terhadap laki-laki. Prinsipnya perempuan tidak dianggap laki-laki tidak hebat dari perempuan, tapi juga perempuan tidak merendahkan laki-laki. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perjalanan perjuangan keadilan terhadap kesetaraan gender selama ini telah membuktikan bahwa birokrasi terbuka bagi siapa saja, dan merupakan perwujudan atas kesadaran, kekuatan, kemampuan, serta adanya kesempatan untuk mendapat semua itu. Siapapun yang peduli pada keadilan gender selayaknya paham bahwa memberikan kesempatan khusus bagi perempuan memang perlu, tapi akan kehilangan maknanya jika tk diimbangi dengan usaha tekun membangun usaha, tekun membangun kesadaran dan kekuatan birokrasi bagi kalangan perempuan.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018, R mengatakan kepada peneliti:

"saya sudah lama menduduki jabatan KASI PEM. TRANTIB di kelurahan antang ini. Kalau saya pribadi cari yang jujur dan mau bekerja keras untuk masyarakat antang. Tidak berpengaruh jika perempuan duduk di kursi birokrasi dan rumah tangganya sama sekali tidak terganggu. Jika perempuan berada didalam rumah dia harus mengurus rumah tangganya dan kalau di birokrasi atau pemerintahan daerah harus urusi masyarakat banyak. Intinya berjuang untuk rakyat. 30% itu sangat bagus untuk perempuan dan sudah relevan dengan jumlah perempuan yang ada di kelurahan ini. Sesuai perkembangan zaman, bisa saja nanti akan berubah menjadi 70% kepercayaan rakyat sesuai dengan kinerja baik perempuan atau laki-laki. Sebenarnya jika kita melihat kinerja perempuan disini bukan sekedar mengurus kepentingan perempuan, bukan tetapi mengurus masyarakat banyak yang ada di kelurahan antang"

Informan diatas menjelaskan pengalaman di birokrasi atau pemerintahan daerah membuatnya berasumsi bahwa perempuan juga layak untuk duduk di bangku birokrasi adalah ia yang jujur dan bekerja keras untuk masyarakat antang. Kerja-kerja domestic tidak mempengaruhi ketika perempuan menduduki kursi pemerintahan daerah, maksudnya adalah perempuan bekerja keras harus mampu mengimbangi antara urusan masyarakat antang dan urusan keluarga. Sehingga kuota 30 % itu relevan bagi perempuan di birokrasi dan bisa naik 70%.

Kriteria yang menyudutkan peran ganda yang dilakukan secara proporsional oleh perempuan birokrasi yang bekerja di rana public. Dimana peran ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan didominasi oleh laki-laki. Pemicunya bisa bermacam-macam mulai dari keinginan untuk aktualisasi diri, ambisi akan kekuasaan, namun yang paling dominan adalah factor ekonomi

untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Walaupun sudah menjadi tanggung jawab besar untuk mengurusinya, dan para feminis sudah membuat usaha-usaha untuk sebuah kesetaraan 50-50, sehingga seringkali menuduh bahwa keluarga adalah penghambat tuntutan tersebut. Maka tidak heran pula, ketika menjejaki ruang-ruang publik ini segalanya didominasi oleh kaum laki-laki. Pemaknaan dan tafsir ruang politik bagi perempuan memberi asumsi kepada setiap masyarakat bahwa ini adalah hal yang nantinya akan menyebabkan banyak ketimpangan khususnya dalam keluarga.

Dalam wawancara yang dilaksanakan 25 September 2018, I menyatakan kepada peneliti:

"waktu saya banyak tersita di ruang public, ridho suami dan keluarga menjadi penopang dalam mengurusinya dan melayani masyarakat antang. Mengemban amanah sebagai pejabat birokrasi, itu waktu saya tersita secara otomatis. Bukan hanya tim yang saya miliki dan saya bisa memiliki interskill dan survive saya dalam mengerjakan tugas di kelurahan. Karena saya tidak mau jika keluarga menjadi korban. Jabatan saya sebagai perempuan yang duduk di kursi pemerintahan daerah adalah sebuah keistimewaan bagi saya pribadi. Kita melayani masyarakat antang, melayani orang banyak, kebutuhan mereka terpenuhi, nah kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Asal kebutuhan kita yang tidak neko-neko, kebutuhan kita standar yang tidak melebihi kebutuhan standar itu. Pendidikan, pengetahuan itu juga sangat penting, karena menunjang saya dalam survive menjalankan tugas sebagai staf di kelurahan."

Informan diatas menyatakan bahwa mengemban amanah sebagai pejabat birokrasi adalah sebuah bentuk keprofesionalnya seseorang perempuan yang selalu disudutkan mengenai masalah domestic atau keluarga, namun ketika seorang perempuan mampu mendapat support dari keluarga untuk terjun ke dunia birokrasi itu justru bagus, dan menjadi sebuah keistimewaan jika mendapat gelar

sebagai staf di kelurahan antang. Bukan sekedar label ataupun gelar, perempuan yang menduduki kursi birokrasi harus lebih dalam berpikir dan bertindak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat antang, tanpa mengabaikan peran sebagai istri dan ibu. Peran ganda harus dilakukan secara optimal sehingga membuat perempuan proporsional dalam menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan daerah di kelurahan antang. Terlepas dari hal tersebut, pelatihan dalam pengawasan pendidikan birokrasi perempuan sudah terlaksana bukan hanya pada saat memasuki tahun-tahun birokrasi, sehingga sejak dini sudah ada persiapan yang matang bagi calon birokrasi perempuan di tahun-tahun birokrasi selanjutnya.

## **B. Penjabaran Hasil Penelitian**

Demokrasi mengamanahkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan birokrasi, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan khususnya kelurahan antang. Yang secara social terpinggirkan karena adanya budaya patriarki yang tidak ramah terhadap perempuan. Kontruksi social budaya yang menempatkan perempuan yang memberi dogma dalam pemikiran masyarakat hanya boleh mengurus persoalan domestic saja, dan tidak ada hak untuk merambah area birokrasi yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kenyataan itu masih tertanam kuat dalam pemikiran masyarakat awam. Ada kontruksi budaya dalam persoalan keterwakilan perempuan di kehidupan sehari-hari. Perempuan secara proporsional terlibat dalam kehidupan di ranah birokrasi.

Diberbagai Negara sekarang ini, gerakan fundamentalis menempatkan diri dalam banyak cara, kebanyakan melalui perjuangan melawan instusi sekuler dan konstitusi yang menjaminnya. Model wacana yang berasal dari ide tradisional tentang moralitas, keluarga, kelas, dan perbedaan jenis kelamin muncul kembali dalam panggung birokrasi yang menyerukan kembali pada tradisi lama tentang pemisahan bidang jenis kelamin dengan menekankan pada pakaian tradisional, pendidikan, dan sebagainya. Dalam hal ini perkembangan hanya menimbulkan dua masalah penting yakni transformasi social dan gerakan birokrasi serta kedudukan hak-hak perempuan dalam masyarakat . (Tumer,230:2002)

Memberikan sebuah stereotype dan diskriminasi.Yang membuat perempuan dari setiap perkembangan jaman membawa paradigma tersebut.Kesulitan keluar dari perspektif ini merepresentasikan perempuan dalam bidang birokrasi masih jauh dari yang diharapkan.Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman untuk menyatukan persepsi tersebut.Meski sejauh ini, keberadaan sudah ditonjolkan oleh kaum perempuan dengan dalih kedudukan di kursi birokrasi.

Dalam setiap decade birokrasi, sebagai kebijakan pengambilan keputusan, perempuan sudah menunjukkan keberadaannya.Tapi secara kuantitas perempuan menduduki gelar minoritas dari dominasi kaum laki-laki.Keterbatasan kuantitas perempuan memang telah konstruk.Dengan adanya pembatasan kuota perempuan khususnya dibangku birokrasi bukan, bahkan sejak awal pendidikan perempuan masih terbilang belum mempuni dari yang diharapkan.Penunjang keberadaan perempuan dikancah birokrasi adalah pendidikan dan ilmu

pengetahuannya. Disamping kemandirian ekonomi sesuai dengan perkembangan jaman yang sudah semakin global. Percepatan ini dipengaruhi oleh system seperti masalah ekonomi, social, dan birokrasi.

Karena peran privat yang menjadi stereotype pada perempuan sehingga dominasi laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan pengetahuan semakin tak terlelakan. Hal ini sesuai dengan teori gender, dalam mempermudah peneliti menganalisis data diatas, yakni menurut nature yakni adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus terima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa antara kedua jenis tersebut memiliki peran yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat di pertukaran, tetapi tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiah. Oleh karena itu, sifat stereotype peran gender antara laki-laki dan perempuan sulit dirubah, serta dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan tidak mengamin dan keluar daripada peran dan tugas yang kodrati dan sadar dengan kelemahan teori nature. Karena menciptakan paradigma yang stagman dalam proses perjuangan kaum perempuan dirana public yakni birokrasi.

Teori nature menjelaskan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pola hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui kontruksi social budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan peran dan kontribusinya dalam bermasyarakat dan bernegara. Kontruksi social menempatkan perempuan dan laki-laki, diidentikkan dengan budaya patriarki (Manshour Faqih:2004). Perjuangan kaum



perempuan terkait kesetaraan ini hanya akan melahirkan paham social konflik, memperjuangkan kesamaan dalam segala aktivitas masyarakat seperti di birokrasi atau pemerintahan daerah. Teori nature ini memang melahirkan sebuah bentuk teori konflik dari segi pencapaiannya. Seperti konsep yang diilhami Karl Marx dalam konflik perjuangan kelas, dominasi laki-laki sebagai kaum borjuis dan minoritas kaum perempuan sebagai proletar. Untuk mendapatkan kesamaan hak dalam setiap dimensi kehidupan tak terkecuali kiprah perempuan dalam birokrasi dan mencoba menghancurkan benteng pertahanan patriarki yang dalam proses panjang sangat sulit untuk diruntuhkan.

Keberadaan perempuan dirana birokrasi masih menjadi sorotan para pejuangfeminis, keterikatan besar tanggung jawab keluarga ini membuat perempuan masih dalam taraf ketidakmandirian secara birokrasi. Jelas buktinya dari beberapa wawancara dengan staf kelurahan antang. Bahwa kerja ganda menjadi kewajiban bagi mereka meski perempuan kelurahan antang telah menduduki jabatan sebagai pemerintah daerah, tugas rumah tangga tidak bisa dikesampingkan, begitupun tanggung jawabnya sebagai staf kelurahan antang jelas membuktikan teori konflik berpotensi untuk menghilhami dalam kehidupan para perempuan di kelurahan itu sendiri.

### **C. Interpretasi Hasil Penelitian**

Penggambaran hasil dengan pemaknaan yang diberikan hasil wawancara serta teori-teori yang relevan itu teori Struktural Fungsional dan teori Struktural Konflik. Dalam berbagai pandangan umumnya manusia memiliki persepsi yang

berbeda-beda. Berbagai hasil penelitian yang diberikan peneliti memberikan hasil penelitian dengan interpretasi atau pemaknaan yang berbeda pula dan memberikan benturan hasil wawancara beserta teori yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan berikut ini hasil dari interpretasi penelitian yaitu:

No	Informan	Hasil wawancara	Interpretasi	Teori
1	NR	<p>Kriteria perempuan yang layak duduk di kursi birokrasi adalah mempunyai pengetahuan, pendidikannya dia harus berpendidikan dalam arti dia mempunyai pengalaman eksekutif, setelah menempuh pendidikan dan menjadi guru misalnya. Birokrasi itu bukan hanya kerja otot tapi kerja pemikiran untuk mengetahui kontribusi pemikiran minimal ia harus mempunyai pengalaman kerja selanjutnya jika dia anggota birokrasi harus cinta tanah air. Tapi kalau jadi ibu rumah tangga saja tidak gampang nanti kita harus tau kondisi di lapangan seperti apa, dalam eksekutif seperti apa. Apalagi bagi seorang perempuan yang mempunyai anak, menurut saya jangan sampai anak menjadi korban, karena itu adalah asset masa depan negri</p>	<p>Untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Menjadi pemimpin disuatu intasnsi tidak boleh mencampurkan urusan birokrasi dengan urusan rumah tangga.</p>	<p>Struktural Konflik. Ralp Dahendorf. (1986:197-198)</p>

		ini jangan sampai anak tersebut terbengkalai dalam pendidikan psikologinya.		
2	R	Kalau saya pribadi cari yang jujur dan mau bekerja keras untuk masyarakat antang. Tidak berpengaruh jika perempuan duduk di kursi birokrasi dan rumah tangganya sama sekali tidak terganggu. Jika perempuan berada dalam rumah dia harus mengurus rumah tangganya dan kalau dalam birokrasi atau pemerintahan daerah harus urusi masyarakat banyak. 30% itu sangat bagus untuk perempuan dan sudah relevan dengan jumlah perempuan yang ada di kelurahan ini. Sesuai perkembangan zaman, bisa saja nanti akan berubah menjadi 70% kepercayaan rakyat sesuai dengan kinerja baik perempuan atau laki-laki.	Untuk menjadi seorang pemimpin sangat dibutuhkan yang namanya kejujuran dan mau bekerja keras.	Struktural Fungsional. Ralp Dahendorf. (1986:197-198)
3	I	Waktu saya banyak tersita di rana public, ridho suami dan keluarga menjadi penopang dalam mengurus dan melayani masyarakat antang. Mengemban amanah sebagai pejabat birokrasi, itu waktu saya tersita secara otomatis. Jabatan saya sebagai perempuan yang duduk	Semenjak saya menduduki kursi birokrasi di kelurahan antang, waktu saya banyak tersita di ruang birokrasi sehingga waktu	Struktural Konflik. Ralp Dahendorf (1986:197-198)

		dikursi kelurahan antang adalah sebuah keistimewaan bagi saya pribadi. Kita melayani masyarakat antang dan melayani banyak orang, kebutuhan mereka terpenuhi nah kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Asal kebutuhan kita tidak neko-neko, kebutuhan kita sangat standar yang tidak melebihi kebutuhan standar itu, pendidikan, pengetahuan itu juga sangat penting, karena menunjang saya dalam menjalankan tugas sebagai staf kelurahan antang	bersama keluarga sangatlah minim. Tapi kita sebagai perempuan harus pintar membagi waktu dengan urusan birokrasi dan keluarga.	
--	--	---	--	--

Dari hasil table interpretasi diatas maka, untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Menjadi pemimpin disuatu instansi tidak boleh mencampurkan urusan birokrasi dengan urusan rumah tangga dan seorang pemimpin juga harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan yang namanya kejujuran dan bekerja keras.

#### **D. Cara Kerja Teori**

setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan masalahnya. Untuk itu perlu disusun landasan teori yang memuat pokok-pokok pikiran dalam menggambarkan permasalahan yang akan dihadapi dan memudahkan kita untuk mencari pemecahan dari masalah yang ada.

Dalam mengkaji suatu masalah dibutuhkan suatu teori yang bersifat sebagai unit analisis yang memecahkan masalah dengan apa yang dia angkat sebagai suatu masalah.

Dalam teori structural fungsional, Ralp Dahendrof menjelaskan bagaimana fungsinya suatu struktur, baik mikro maupun makro, jika tetap ada maka ia memiliki fungsi. Hasil dari teori tersebut maka seorang perempuan saat ini sudah harus menjadi pemimpin dirana publik bukan hanya laki-laki tergantung dengan kemampuan yang dimilikinya.

Jika perempuan terjun dalam dunia birokrasi tidak ada salahnya itu sah-sah saja tetapi perempuan itu harus mempunyai kemampuan terhadap dunia politik. Dalam era ini pemikiran perempuan sangat dibutuhkan dalam dunia birokrasi, dan perempuan juga sudah memiliki kepercayaan yang sangat tinggi untuk terjun ke dunia birokrasi.

Dalam hal kepemimpinan tidak serta merta seseorang menjadi pemimpin dalam kepemimpinan orang tersebut harus mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang tinggi menjadi pemimpin disuatu instansi tidak boleh mencampurkan urusan birokrasi dengan urusan keluarga. Untuk menjadi seorang pemimpin ia harus mengambil tanggung jawab tambahan.

Perempuan yang duduk di kursi birokrasi dan rumah tangganya tidak terganggu sama sekali. Jika perempuan berada dalam rumah dia harus mengurus rumah tangganya dan kalau dalam birokrasi ia harus mengurus masyarakat.

Pendekatan teori structural konflik melihat bahwa struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki

motif, maksud kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda pula. Setiap masyarakat harus tunduk pada proses perubahann social terdapat dimana-mana dan masyarakat dalam hal ini memperlihatkan pertikaian dan konflik social terdapat diman-mana.

Perempuan dalam agama adalah makhluk yang sempurna tugas kodrat sebagai perempuan ialah mengurus anggota keluarganya. Perempuan juga bisa mengemban amanah ini dengan sangat baik selain mengurus rumah tangganya ia juga harus menjadi seorang guru bagi anak-anaknya agar anak-anaknya kelak menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Dalam hal pekerjaan seorang perempuan dalam rumah tangganya, perempuan juga bisa mengemban amanah sebagai pegawai pemerintah. Banyak orang berfikir bahwa perempuan harus tinggal dirumah dan mengurus keluarganya. Ia tidak boleh bekerja diluar rumah, biar saja seorang kepala keluarga yang bekerja di luar rumah. Hal tersebut bisa dibantah, karena pada abad ini dimana seorang perempuan tidak lagi terkungkung didalam rumah mengurus rumah tangganya tapi dalam era ini perempuan juga bisa keluar rumah untuk bekerja.

Kita tidak bisa pungkiri bahwa pemikiran perempuan saat ini tidak terlepas dari urusan rumah tangga tetapi perempuan juga ingin ia berkarir diluar ruumah ia ingin meyibukkan diri dengan dunia birokrasi. Sekain itu, perempuan saat ini sudah menempuh pendidikan yang sangat tinggi ia bersekolah setinnggi-tingginya agar ia memiliki ilmu dalam dunia birokrasi maupun ilmu-ilmu lainnya.

Tidak ada salahnya jika perempuan terjun ke dunia birokrasi apalagi untuk menjadi seorang pemimpin di suatu instansi. Tetapi pada saat perempuan berada dalam rumah dia tidak boleh mengambil alih peranan laki-laki yang menjadi pemimpin dalam rumah tersebut.

Maka dari penjelasan di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam era ini kita tidak boleh mengekang perempuan untuk tinggal di rumah saja. Kita harus memberikan kebebasan di luar rumah tetapi dalam hal kewajaran. Ia juga harus memanfaatkan ilmu yang dia miliki di luar rumah. Berikan kepercayaan terhadapnya bahwa ia bisa menjadi seorang ibu dan menjadi seorang pemimpin di dalam birokrasi.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dalam perkembangannya, saat ini telah banyak kita temui peran wanita yang telah berkembang dalam pembangunan. Ketenaga kerjaan hingga mencapai lintas gender tentunya tidak terlepas dari perjuangan kaum feminis sebagai penerus RA Kartini. Keberadaan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender sebagai bukti bahwa pemerintah ikut mengupayakan keadilan bagi semua gender dalam memperoleh pendidikan, lapangan kerja bahkan mengutamakan quota 30% bagi perwakilan perempuan dalam birokrasi. Akan tetapi, adanya kesetaraan gender yang semakin pesat perkembangannya, tidak serta merta kehilangan begitu saja praktik tindakan semena-mena terhadap wanita berkurang.

Keberadaan perempuan di ruang public sudah dapat diterima oleh masyarakat di kelurahan antang. Laki-laki dan perempuan boleh menjadi bagian dari birokrasi juga bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa diperankan oleh laki-laki, kecuali didalam agama dan keluarga. Karena dalam agama perempuan tidak boleh menjadi imam dalam keluarga kepala keluarga tetap laki-laki (Ayah), pada hakekatnya perempuan tidak ingin melebihi laki-laki. Mereka hanya ingin setara saja, dan ketika itu bisa sejalan perempuan bisa terbebas dari belenggu budaya patriarki.

Subordinasi yang biasanya menganggap perempuan tidak pantas memimpin dan stereotip yang memberikan pelabelan negative kepada perempuan sudah tidak terjadi lagi di kelurahan antang. Perempuan dianggap mempunyai



keahlian dan kemampuan tersendiri dalam hal birokrasi. Masyarakat malah menganggap sifat-sifat tersebut sebagai hal yang positif untuk kemajuan kelurahan nya. Dengan sifat perempuan yang cerewet, egois, dan lemah lembut membuat banyak perubahan di dalam pembangunan masyarakat kelurahan antang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap isu patriarki pada perempuan dalam birokrasi kelurahan antang mengenai isu patriarki pada perempuan dalam birokrasi dan keberadaan perempuan dalam birokrasi dikonstruks oleh sosial budaya menempatkan perempuan dalam pemikiran masyarakat hanya di domestic saja. Keberadaan perempuan dirana public masih menjadi sorotan, karena keterikatan tradisional ini membuat perempuan masih dalam taraf ke tidak mandirian secara politik

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti menyarankan:

1. Pemerintah seharusnya memberikan aturan-aturan maupun regulasi yang responsipe gender terhadap keterwakilan perempuan dalam birokrasi agar tercapai sebuah titik keseimbangan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
2. Perempuan di birokrasi harus tetap menjaga sinergitas antara lembaga-lembaga keperempuanan sehingga mempermudah dalam mengakses informasi yang intens dan berkala terhadap isu-isu keperempuanan, serta kelangsungan perjuangan kaum perempuan secara universal.

- 
- 
3. Kepada peneliti selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang terjadi secara massif membuat semakin bertambahnya teori social di kaitkan agar menguatkan data dari apa yang diteliti.

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN AHLI**

### **A. Identitas Responden**

Nama :

Umur :

Jabatan:

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Coba anda jelaskan bagaimana pandangan anda tentang perempuan?
2. Bagaimana pandangan anda tentang emansipasi wanita?
3. Mengenai perempuan, seberapa hebatkah peran perempuan secara umum di mata anda?
4. Dalam sistem politik, seberapa besar antusias anda jika perempuan terjun didalam dunia birokrasi?
5. Menurut anda, bagaimana anda melihat sebuah kepemimpinan seorang perempuan?
6. Apakah anda setuju jika perempuan juga mampu menjadi seorang pemimpin dalam suatu birokrasi?

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN KUNCI**

### **A. Identitas Responden**

Nama :

Umur :

Jabatan:

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pandangan anda, bahwa selama ini di Kelurahan Antang tidak pernah ada perempuan yang mencalonkan diri menjadi kepala Kelurahan jika dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang lain?
2. Apa saja kriteria-kriteria atau persyaratan untuk bergabung di ranah birokrasi ini?
3. Menurut anda, sejauh mana pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sebuah birokrasi?
4. Apa sajakah dampak positif dan dampak negatif jika perempuan menjadi pemimpin di kelurahan antang?
5. Apakah anda bisa membagi waktu antara pekerjaan di birokrasi dan keluarga agar tidak ada yang menjadi korban?

## **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN BIASA**

### **A. Identitas Responden**

Nama :

Umur :

Jabatan:

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat anda jika masyarakat antang dipimpin oleh seorang perempuan?
2. Bagaimana menurut anda, tentang kesetaraan hak dan perlindungan atas kaum perempuan?
3. Menurut anda, apakah perempuan kerjanya hanya di tempat tidur, dapur, dan sumur?
4. Menurut anda, bagaimana anda melihat minat perempuan masyarakat antang untuk terlibat dalam jabatan-jabatan birokrasi?
5. Apa hal yang menghambat perempuan masyarakat antang untuk tertarik dalam jabatan di kelurahan antang?

**TABEL INFORMAN**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Informan Kunci a. Kepala Kelurahan Antang b. Sekretaris Kelurahan Antang	Selaku orang yang mengetahui informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
2	Informan Ahli a. perempuan yang terlibat langsung dalam staf kelurahan antang	Selaku seorang perempuan yang terlibat langsung dalam staf kelurahan antang
3	Informan Biasa a. masyarakat biasa	Mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung

## RIWAYAT HIDUP



**Nurfitriyani.** Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Februari 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Haedar Anwar,BA dan Marwani. Penulis menempuh Pendidikan Dasar di SD Inpres Antang 1 mulai tahun 2003 sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 17 Makassar. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Makassar.

Kemudian pada tahun 2014 penulis berhasil lulus pada jurusan pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata 1 (S1) kependidikan. Dalam organisasi intra kampus penulis pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) pendidikan sosiologi sebagai Koordinator bidang kesekretariatan periode 2015-2016, dan menyelesaikan studi pada tahun 2019 dengan gelar sarjana pendidikan.